



**ANALISIS KINERJA KEUANGAN ATAS PELAKSANAAN
JALAN DAN JEMBATAN MENGGUNAKAN METODE
VALUE FOR MONEY PADA DINAS PUPR BINA MARGA
KABUPATEN LANGKAT**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

VIRA AULIA RUSLI
NPM 1715310481

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

N A M A : VIRA AULIA RUSLI
NPM : 1715310481
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN
JENJANG : S 1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KINERJA KEUANGAN ATAS
PELAKSANAAN JALAN DAN JEMBATAN
MENGUNAKAN METODE *VALUE FOR MONEY*
PADA DINAS PUPR BINA MARGA KABUPATEN
LANGKAT

MEDAN, NOVEMBER 2021

KETUA PROGRAM STUDI

(Muharram RITONGA, BA., MSC.M)

DEKAN



(Dr. ONNY MEDALINE, S.H., M.KN.)

PEMBIMBING I

(Dr. DESI ASTUTI, S.E., M.M.)

PEMBIMBING II

(SYAHRIAL HASSANUDDIN POHAN, S.E.SY., ME.)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

**SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH PANITIA UJIAN
SARJANA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

PERSETUJUAN UJIAN

N A M A : VIRA AULIA RUSLI
NPM : 1715310481
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN
JENJANG : S 1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KINERJA KEUANGAN ATAS
PELAKSANAAN JALAN DAN JEMBATAN
MENGUNAKAN METODE *VALUE FOR MONEY*
PADA DINAS PUPR BINA MARGA KABUPATEN
LANGKAT

MEDAN, OKTOBER 2021

KETUA

(MAYA MACIA SARI, SE, M.SI.)

ANGGOTA I

(Dr. DESI ASTUTI, SE., MM.)

ANGGOTA II

(SYAFRIAL HASANUDDIN POHAN, SE.SY., ME.)

ANGGOTA III

(HARTATO RIANTO, SE.SY., ME.)

ANGGOTA IV

(CAHYO PRAMONG, SE., MM.)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vira Aulia Rusli
Npm : 1715310481
Fakultas/Program Studi : Sosial Sains / Manajemen
Judul Skripsi : Analisis Kinerja Keuangan Atas Pelaksanaan Jalan dan Jembatan Menggunakan Metode *Value For Money* Pada Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat)
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, November 2021



Vira Aulia Rusli
NPM 1715310481

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vira Aulia Rusli

Tempat/Tanggal Lahir : Pematang Tengah, 08 Juli 1999

NPM : 1715310481

Fakultas : Sosial Sains

Program Studi : Manajemen

Alamat : Securai Pasar Kelurahan Securai Utara

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan PancaBudi.

Sehubung dengan hal tersebut , maka saya tidak akan lagi melakukan ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, November 2021
Yang membuat pernyataan



Vira Aulia Rusli
NPM 1715310481

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

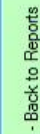
Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

Ka.LPMU

Yusni Muhandani Ritonga, BA., MSc

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------



Report file name: originality report 18.10.2021 10-12-8 - VIRA AULIA RUSLI_1715310481_MANAJEMEN.docx.html

Report location: C:\Users\Admin\Documents\Plagiarism Detector reports\originality report 18.10.2021 10-12-8 - VIRA AULIA RUSLI_1715310481_MANAJEMEN.docx.html

Plagiarism Detector v. 1921 - Originality Report 10/18/2021 10:12:06 AM

Analyzed document: VIRA AULIA RUSLI_1715310481_MANAJEMEN.docx Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License03

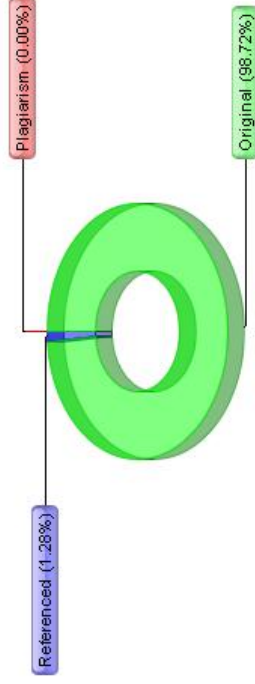
Comparison Preset: Rewrite Detected language: Id

Check type: Internet Check



Detailed document body analysis:

Relation chart:



Distribution graph:





YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 667/PERP/BP/2021

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan atas nama saudara/i:

Nama : VIRA AULIA RUSLI
N.P.M. : 1715310481
Tingkat/Semester : Akhir
Fakultas : SOSIAL SAINS
Jurusan/Prodi : Manajemen

Bahwasannya terhitung sejak tanggal 27 September 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 27 September 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan



Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

No. Dokumen: FM-PERPUS-06-01
Revisi : 01
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 14 Oktober 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : VIRA AULIA RUSLI
 Tempat/Tgl. Lahir : PEMATANG TENGAH / 8 Juli 1999
 Nama Orang Tua : CHAIRUL R
 N. P. M : 1715310481
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Manajemen
 No. HP : 082165871784
 Alamat : SECURAI PASAR

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul ANALISIS KINERJA KEUANGAN ATAS PELAKSANAAN JALAN DAN JEMBATAN MENGGUNAKAN METODE VALUE FOR MONEY PADA DINAS PUPR BINA MARGA KABUPATEN LANGKAT, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga : **S**

Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya



VIRA AULIA RUSLI
 1715310481

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

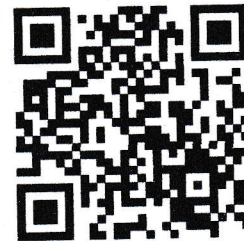
JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA
Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Mahasiswa : VIRA AULIA RUSLI
NIM : 1715310481
Program Studi : Manajemen
Tingkat Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Syahrial Hasanuddin Pohan, SE.Sy., ME
Judul Skripsi : ANALISIS KINERJA KEUANGAN ATAS PELAKSANAAN JALAN DAN JEMBATAN MENGGUNAKAN METODE VALUE FOR MONEY PADA DINAS PUPR BINA MARGA KABUPATEN LANGKAT

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
12 November 2021	Berita Acara	Disetujui	
12 Oktober 2021	Berita acara skripsi menuju acc meja hijau	Revisi	
12 Oktober 2021	Acc Sidang meja hijau	Disetujui	
12 November 2021	Acc Jilid lux	Disetujui	

Medan, 12 November 2021
Dosen Pembimbing..



Syahrial Hasanuddin Pohan, SE.Sy., ME



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA

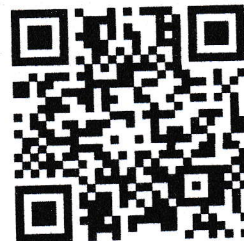
Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Mahasiswa : VIRA AULIA RUSLI
NIM : 1715310481
Program Studi : Manajemen
Tingkat Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Dr Desi Astuti, SE., MM
Judul Skripsi : ANALISIS KINERJA KEUANGAN ATAS PELAKSANAAN JALAN DAN JEMBATAN MENGGUNAKAN METODE VALUE FOR MONEY PADA DINAS PUPR BINA MARGA KABUPATEN LANGKAT

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
12 November 2021	ACC seminar proposal	Disetujui	
12 November 2021	ACC Sidang meja hijau	Disetujui	
12 November 2021	ACC jilid lux	Disetujui	

Medan, 12 November 2021
Dosen Pembimbing,



Dr Desi Astuti, SE., MM



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO. BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
 PROGRAM STUDI MANAJEMEN
 PROGRAM STUDI AKUNTANSI
 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
 PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)
 (TERAKREDITASI)
 (TERAKREDITASI)
 (TERAKREDITASI)
 (TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : VIRA AULIA RUSLI
 Tempat/Tgl. Lahir : PEMATANG TENGAH / 08 Juli 1999
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1715310481
 Program Studi : Manajemen
 Konsentrasi : Manajemen Keuangan
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 144 SKS, IPK 3.69
 Nomor Hp : 082165871784
 Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	ANALISIS KINERJA KEUANGAN ATAS PELAKSANAAN JALAN DAN JEMBATAN MENGGUNAKAN METODE VALUE FOR MONEY PADA DINAS PUPR BINA MARGA KABUPATEN LANGKATO

Disetujui/Ditolak Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Cerit Yang Tidak Benar



[Signature]
 (Carito Pramono, S.E., M.M.)

Medan, 19 April 2021

Pemohon,

[Signature]
 (Vira Aulia Rusli)

Tanggal :
 Disahkan oleh :
 Dekan
[Signature]
 (Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.)

Tanggal : 20 April 2021
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :
[Signature]
 (Dr. Resti Astuti, SE., MM.)

Tanggal : 23 April 2021
 Disetujui oleh :
 Ka. Prodi Manajemen
[Signature]
 (Ramadhan Harahar, S.E., S. Psi, M.Si.)

Tanggal : 22 April 2021
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II :
[Signature]
 (Syahrinal Hasanuddin Pohan, SE.Sy., ME.)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02 Revisi: 0 Tgl. Eff: 22 Oktober 2018

ABSTRAK

Kinerja Keuangan penting untuk dikaji dalam organisasi sektor publik termasuk pemerintahan. Diterapkannya penganggaran berbasis kinerja, pemerintah daerah harus mampu menghasilkan kinerja keuangan secara baik dengan harapan dapat mengurangi terjadinya pemborosan, kebocoran dana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengukuran tingkat kinerja keuangan pada Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima. Populasi pada penelitian ini merupakan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Dinas PUPR Bina Marga kabupaten Langkat. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat Tahun 2016-2020. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang diolah dengan microsoft excel dengan metode *value for money*. Hasil analisis kinerja keuangan menunjukkan tingkat ekonomis selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuatif. Rasio ekonomis berada dibawah angka kriteria yaitu 100% sehingga rasio ekonomis dinilai baik. Rasio efisiensi berada diatas 100% sehingga rasio efisiensi dinilai tidak baik yang disebabkan total belanja selalu lebih besar dari total pendapatan. Rasio efektivitas pada tahun 2016 sampai tahun 2018 hasil perhitungan dinilai tidak baik tetapi, hasil perhitungan tahun 2019 dan 2020 dinilai baik.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan, value for money, ekonomi, efisiensi dan efektivitas

ABSTRACT

Financial performance is important to be studied in public sector organizations including government. With the implementation of performance based budgeting, local government must be able to produce good financial performance in the hope of reducing waste and leakage of funds. The research is a descriptive study with the object under study is the level of financial performance of the Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat using descriptive analysis methods carried out by collecting and presenting data received. The population in this study is a report on the realization of regional revenue and expenditure budget (APBD) of the Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat. The sample taken in this study is the report on the realization of the regional revenue and expenditure budget (APBD) of the Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat for 2016-2020. This research uses quantitative data that is processed with Microsoft Excel with the value for money method. The results of the financial performance analysis show that the economic level for the last 5 years has fluctuated. The economic ratio is below the criterion figure of 100% so that the economic ratio is considered good. The efficiency ratio is above 100% so that the efficiency ratio is considered not good because the total expenditure is always greater than the total income. The effectiveness ratio in 2016 to 2018 is considered not good, however the calculation results for 2019 and 2020 are considered good.

Keywords: Financial Performance, Value for money, Economic, Efficiency and Effectiveness

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam segala nikmat dan karunia- Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini tepat pada waktunya. Adapun skripsi ini berjudul: Analisis Kinerja Keuangan Atas Pelaksanaan Jalan dan Jembatan Pada Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat. Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
2. Ibu Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Husni Muharram Ritonga, BA., MSC.M, selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu Dr. Desi Astuti, S.E., M.M., selaku pembimbing I yang dengan sabar membimbing dan mengoreksi penelitian peneliti serta memberikan berbagai saran agar penelitian yang dihasilkan menjadi semakin lebih baik.
5. Bapak Syahrial Hassanuddin Pohan, SE.Sy., ME., selaku pembimbing II yang memberikan banyak masukan dan arahan terhadap penelitian skripsi ini sehingga peneliti dapat lebih mudah menulis skripsi ini.
6. Para Dosen dan Staff Pengajar Prodi Manajemen Fakultas Sosial Sains Universitas Panca Budi Medan atas segala ilmu yang telah diberikan kepada peneliti.

7. Ayahanda Chairul Rusli serta ibunda Sri Yulianti tercinta yang telah memberikan doa dan dukungan dengan penuh ketulusan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini dengan baik
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah memberikan dorongan yang luar biasa selama proses pembuatan skripsi ini.
9. Serta pimpinan Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan melakukan pengumpulan data pada Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, seperti kata pepatah “tiada gading yang tak retak”. Orang hebat bukan yang berhasil menyusun skripsi dengan sempurna, tetapi orang hebat adalah orang-orang yang dengan lapang dada menerima berbagai kritikan, masukan, dan saran untuk selalu menjadi lebih baik hari-demi hari. Oleh karena itu, berbagai masukan, kritikan, dan saran sangat peneliti harapkan untuk perbaikan dari penelitian dan penelitian skripsi ini. Semoga kiranya peneliti dapat menghasilkan berbagai penelitian yang lebih baik dari ini suatu hari nanti.

Medan, November 2021
Peneliti

Vira Aulia Rusli
NPM: 1715310481

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	10
BAB II: LANDASAN TEORI	
A. Uraian Teoritis.....	13
1. Definsi Kinerja	13
a. Tujuan Sistem Pungukuran Kinerja	14
b. Manfaat Pengukuran Kinerja	15
c. Karakteristik indikator kinerja.....	16
d. Manfaat Indikator Kinerja.....	16
2. Kinerja Keuangan.....	17
3. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	17
4. Laporan Realisasi Anggaran	19
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).....	20
a. Fungsi APBN.....	20

b. Pelaporan dan Perencatatan APBN	21
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	21
7. Organisasi Sektor Publik	23
a. Pengertian Organisasi Sektor Publik	23
b. Pengukuran Kinerja Sektor Publik	24
c. Aspek-Aspek Pengukuran Sektor Publik	25
8. <i>Value For Money</i>	25
a. Pengembangan Indikator <i>Value for Money</i>	27
b. Pengukuran Kinerja <i>Value for Money</i>	28
B. Penelitian Terdahulu.....	30
C. Kerangka Konseptual	37

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	40
C. Populasi dan Sampel.....	41
D. Jenis dan Sumber Data	41
E. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	42
F. Teknik Pengumpulan Data.....	43
G. Teknik Analisis Data.....	44
1. Rasio Ekonomis.....	44
2. Rasio Efisiensi.....	45
3. Rasio Efektivitas.....	47

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	49
1. Sejarah Perkembangan Perusahaan.....	49
2. Penyajian Data	60
3. Analisis Data	63
a. Uji Rasio Ekonomis	63
b. Uji Rasio Efisiensi	67
c. Uji Rasio Efektivitas	70
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	74
1. Ekonomis	74
2. Efisiensi.....	76

3. Efektivitas	77
BAB V: SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	83

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Pengukuran Rasio Ekonomis Dinas PUPR Bina Marga kabupaten Langkat.....	5
Tabel 1.2 Pengukuran Efisiensi Dinas PUPR Bina Marga kabupaten Langkat....	6
Tabel 1.3 Laporan Anggaran Pendapatan dan Realisasi Anggaran PendapatanDinas PUPR Bina Marga kabupaten Langkat	7
Tabel 2.1 Mapping Penelitian Sebelumnya	30
Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Penelitian	40
Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel	43
Tabel 3.3 Kriteria Tingkat Rasio Ekonomis Kinerja Keuangan	45
Tabel 3.4 Kriteria Tingkat Rasio Efisiensi Kinerja Keuangan	46
Tabel 3.5 Kriteria Rasio Efektivitas Kinerja Keuangan.....	48
Tabel 4.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2016	60
Tabel 4.2 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2017	61
Tabel 4.3 Laporan Realisasi Anggaran Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2018	61
Tabel 4.4 Laporan Realisasi Anggaran Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2019	62
Tabel 4.5 Laporan Realisasi Anggaran Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020	62
Tabel 4.6 Rasio Ekonomis Kinerja Keuangan Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat Tahun 2016-2020.....	64
Tabel 4.7 Rasio Efisiensi Kinerja Keuangan Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat Tahun 2016-2020	67
Tabel 4.8 Rasio Efektivitas Kinerja Keuangan DUPR Bina Marga Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2016-2020	70

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	39
Gambar 4.1 Logo Pemkab Langkat	50
Gambar 4.2 Logo Dinas PUPR Kabupaten Langkat.....	49
Gambar 4.3 Struktur Organisasi.....	54
Gambar 4.4 Grafik Perkembangan Rasio Ekonomis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bina Marga Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2016-2020.....	66
Gambar 4.5 Grafik Perkembangan Rasio Efisiensi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bina Marga Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2016-2020.....	69
Gambar 4.6 Grafik Perkembangan Rasio Efektivitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bina Marga Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2016-2020.....	72
Gambar 4.7 Grafik Perkembangan Rasio Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bina Marga Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2016-2020	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Biodata
Lampiran 2	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2016
Lampiran 3	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2017
Lampiran 4	Laporan Realisasi Anggaran Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2018
Lampiran 5	Laporan Realisasi Anggaran Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2019
Lampiran 6	Laporan Realisasi Anggaran Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020
Lampiran 7	Lampiran Pengajuan Judul
Lampiran 8	Bimbingan Dosen Pembimbing I
Lampiran 9	Bimbingan Dosen Pembimbing II
Lampiran 10	Permohonan Riset / Izin Penelitian
Lampiran 11	Balasan Riset / Izin Penelitian
Lampiran 12	Plagiat Checker
Lampiran 13	Bebas Pustaka
Lampiran 14	Pengajuan Meja Hijau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia merupakan bentuk organisasi nirlaba yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, baik meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan kualitas kesehatan, dan sebagainya. Sekarang, pemerintahan daerah mempunyai wewenang memberi pengaturan peraturan daerahnya sendiri. Dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk menerapkan sistem keuangan daerahnya sendiri. Sekarang ini, kinerja pemerintah tengah disorot dengan meningkatnya rasa sadar warga pada pelaksanaan admistrasi publik. Masyarakat sering menilai bagaimana kinerja organisasi sektor publik sebagai sarang pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang dapat merugikan institusi.

Masyarakat yang semakin cerdas dan kritis menuntut agar pemerintahan harus dapat dikelola dengan professional dan pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas publik dari institusi sektor publik. Tuntutannya ini selaras terhadap UU No. 22 Th. 1999 mengenai Pemerintah Daerah serta UU No. 25 Th. 1999 mengenai Primbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dijadikan landasan rangkaian reformasi kelembagaan dalam menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*), yakni pemerintah yang transparan, efisien, ekonomis, serta bertanggung jawab.

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Kepala Daerah mengusulkan bahwa setiap akhir tahun

anggaran, kepala daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

Laporan yang disampaikan meliputi: laporan realisasi anggaran, arus kas dan neraca. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa: Laporan Realisasi merupakan laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam satu periode.

Kinerja keuangan sangat penting untuk dikaji dalam organisasi sektor publik termasuk pemerintah, karena dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja semua pemerintah dituntut untuk dapat menghasilkan kinerja keuangan pemerintah yang baik. Meningkatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik diharapkan dapat mengurangi terjadinya pemborosan, kebocoran dana dan mendeteksi program-program yang secara ekonomi tidak memadai. (Kurniawati, 2016).

Hal yang bisa dipergunakan sebagai alat evaluasi akuntabilitas dalam instansi pemerintahan yakni melalui pengamatan hasil kerja finansial dengan menghitung serta menganalisis tercapainya target serta realisasi pendapatan dan belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik dari segi anggaran maupun belanja Negara, *input*, *output*, *outcome*, dampak dan manfaat. Ukuran hasil kerja atau kinerja keuangan pemerintahan dilaksanakan melalui perbandingan hasilnya yang sudah didapatkan pada periode tertentu dan periode sebelumnya maka bisa dipahami kecenderungannya yang ada.

Kualitas profesionalisme di sektor publik khususnya pemerintahan, dapat dinilai dari konsep *value for money* (nilai dari pada uang) dalam menjalankan aktivitasnya. Metode ini berfokus hanya pada aspek keuangan saja. Menurut Mahmudi (2010) *value for money* merupakan ukuran kinerja guna pengukuran perekonomian, efektivitas, efisiensi pada aktivitas, program maupun organisasinya. *Value for money* merupakan bentuk pengukuran kinerja yang spesifik untuk organisasi sektor publik dalam menilai efektivitas pelayanan publik dengan tujuan memberikan pelayanan yang tepat sasaran. Pentingnya konsep ini, seringkali dikatakan bahwa inti dari mengukur kinerja sektor publik adalah mengukur ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Jika dipahami secara mendalam, konsep *value for money* sebenarnya bukanlah sesuatu hal yang baru, tetapi *value for money* merupakan salah satu prinsip penting anggaran kinerja tata kelola yang baik (*good governance*).

Pengukuran ini sangat penting untuk menilai tanggung jawab dan keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Tanggung jawab tidak hanya mampu menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan tetapi juga mencakup kemampuan untuk menunjukkan bahwa uang publik digunakan secara ekonomis, efektif dan efisien.

Dinas PUPR Bidang Bina Marga Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Langkat merupakan instansi pemerintah yang membidangi prasarana perhubungan darat dalam bentuk pembangunan pelengkap yang diperuntukan bagi perbaikan jalan dan jembatan sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Langkat merupakan bentuk yang telah ditetapkannya UU darurat No.19 Tahun 1957, kemudian diundangkan dengan UU no.16 Tahun 1958. Awalnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bernama Departemen Pekerjaan Umum yang berarti lembaga pemerintah yang memiliki tanggung jawab langsung kepada presiden. Sebelum berubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas PU pada tahun 2000-2004 sempat bernama Departemen Pemukiman dan Pengembangan Wilayah, yaitu termasuk dalam kementerian Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pekerjaan umum, dan pada tahun 2016 sempat bernama Dinas Bina Marga.

Kholidah dan Martini, 2014 mengungkapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) merupakan suatu kelembagaan yang ada pada bawah pemerintahan, mempunyai kegiatan berhubungan terhadap anggaran. Makin besar keperluan warga, misalnya layanan publik, PUPR terdapat tuntutan guna memberi pengembangan atas organisasi dengan efektif. Sehingga, Pemda diinginkan bisa melakukan perbakikan untuk beragam aktivitas layanan publik guna menaikan keyakikan masyarakat melalui peningkatan kinerja.

Menurut Mahmudi (2015) rasio ekonomis merupakan bentuk konversian masukan primer yang berupa sumber daya keuangan menjadi input sekunder berupa tenaga kerja serta bahan dan infrastruktur maupun barang modal yang digunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. Dimana pengukuran rasio ekonomi memerlukan data anggaran pengeluaran dan realisasinya. Menurut (Mahsun, 2016) semakin rendah persentase ekonomis

maka kinerja keuangan pemerintah daerah maka semakin baik. Karena dana realisasi yang digunakan jumlahnya lebih kecil dari anggaran yang telah dianggarkan dengan maksud setiap kegiatan dapat menghemat atau mengurangi biaya yang tidak diperlukan serta tidak ada pemborosan.

Kinerja keuangan Dinas PUPR Bina Marga kabupaten Langkat menggunakan rasio ekonomis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Pengukuran Rasio Ekonomis Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat

Tahun	Realisasi Belanja	Anggaran Belanja	Rasio Ekonomis
2016	Rp. 84.632.535.764	Rp. 120.201.484.087	70,40
2017	Rp. 82.282.940.164	Rp. 97.259.853.617	84,60
2018	Rp. 93.961.265.498	Rp. 119.556.456.886	78,59
2019	Rp. 62.419.983.252	Rp. 71.976.860.805	86,72
2020	Rp. 67.182.925.734	Rp. 74.857.248.974	89,74

Sumber: Data Diolah (2021)

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, diketahui sumber belanja daerah untuk tingkat ekonomis Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat mengalami fluktuatif. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 rata-rata rasio ekonomis kurang dari 100% yaitu 70-80%. Pada tahun 2016 merupakan tahun yang memiliki rata-rata rasio ekonomis paling rendah yaitu dibawah 80% yakni sebesar 70,40%.

Sedangkan rasio efisiensi menurut Mahmudi (2015) rasio efisiensi yaitu bentuk dari dua ukuran yang merupakan realisasi belanja dan anggaran belanja. Efisiensi memiliki manfaat yang dapat mengukur realisasi anggaran belanja sehingga dapat dilihat hasil tingkat keefisiensi pada kinerja keuangan. Suatu instansi dalam melakukan program dan kegiatannya dapat dikatakan efisien jika mampu menghasilkan output dengan input yang sangat rendah, atau dengan input yang mampu

menghasilkan output yang sangat tinggi. semakin kecil rasio efisiensi maka kinerja Dinas PUPR Bina Kabupaten Langkat semakin baik. Pengukuran kinerja keuangan Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat yang diukur menggunakan rasio efisiensi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Pengukuran Efisiensi Dinas PUPR Bina Marga kabupaten Langkat

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	Efisiensi
2016	Rp. 84.632.535.764	Rp. 28.798.032.000	293.88
2017	Rp. 82.282.940.164	Rp. 27.388.092.001	300.43
2018	Rp. 93.961.265.498	Rp. 25.938.372.000	362.24
2019	Rp. 62.419.983.252	Rp. 27.388.312.000	227.90
2020	Rp. 67.182.925.734	Rp. 26.178.732.000	256.63

Sumber: Data Diolah (2021)

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, diketahui sumber dari pendapatan dan belanja Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat untuk tingkat efisiensi belanja pada lima tahun terakhir mengalami fluktuatif dengan rata-rata diatas 100%. Tahun 2018 merupakan tahun yang memiliki rata-rata rasio efisiensi paling tinggi yaitu sebesar 362,24% dan pada tahun 2019 merupakan tahun terendah dengan rata-rata rasio efisiensinya sebesar 227,90%.

Sedangkan rasio efektivitas bermanfaat untuk mengukur keefektifan tujuan dan target yang dicapai yang didasarkan dari ukuran realisasi pendapatan dan anggaran pendapatan. Efektivitas perusahaan dapat dinilai dalam program dan kegiatan nya apabila kontribusi pada output semakin besar terhadap pencapaian tujuannya. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan instansi yang semakin efektif.

Kinerja Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat dapat dilihat dari rasio efektivitas membandingkan realisasi pendapatan dengan anggaran

pendapatan Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 1.3 Laporan Anggaran Pendapatan dan Realisasi Anggaran Pendapatan Dinas PUPR Bina Marga kabupaten Langkat

Tahun	Realisasi Pendapatan	Anggaran Pendapatan	(%)
2016	28.798.032.000	30.662.300.500	94,91
2017	27.388.092.001	32.652.300.900	83,87
2018	25.938.372.000	27.152.000.300	95,53
2019	27.388.312.000	22.252.030.900	123,08
2020	26.178.732.000	22.752.180.000	115,06

Sumber : Data Diolah (2021)

Berdasarkan tabel 1.3 di atas, dipahami yakni perealisasiian penghasilan dalam 2016 sebesar 94,91%. Tapi dalm 2017 pendapatan atau penghasilannya ada penurunan menuju 83,87%. Pada tahun 2018 realisasi pendapatan kembali mengalami peningkatan sebsar 95,53%. Begitu juga pada tahun 2019 dan 2020 berada pada kategori diatas 100% yaitu 2019 sebesar 123,08% dan 2020 sebesar 115,06%. Pendapatan memiliki pengaruh tinggi untuk berjalannya aktivitas instansi, makin tinggi penghasilannya berarti makin tinggi keterampilan instansi melakukan pembiayaan seluruh pengeluarannya maupun aktivitas yang dilaksanakan, menurunnya penghasilan bisa menyebabkan keterampilan usahanya dalam pembiayaan seluruh pengeluaran serta aktivias yang dilaksanakan.

Konsepnya dalam mengukur hasil kerja keuangan melalui metode *value for money* mendukung peneliti menyelenggarakan penelitiannya mengenai cara metodenya ini untuk melakukan pengukuran hasil kerja keuangan pada Dinas PUPR Bina marga Kabupaten langkat. Berdasarkan perbedaan fluktuatif dari masing masing rasio pada lima tahun terakhir yaitu 2016 sampai dengan 2020 maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dengan upaya meningkatkan kinerja keuangan Dinas PUPR Bina Marga kabupaten langkat yang berjudul **Analisis Kinerja Keuangan Atas Pelaksanaan Jalan dan Jembatan Menggunakan Metode *Value For Money* Pada Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat**".

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Tingkat ekonomis belanja Dinas PUPR Bina Marga kabupaten langkat di tahun 2017, 2019 dan 2020 rata-rata nilai rasio ekonomis diatas 70% sehingga memiliki resiko masuk pada kategori kurang ekonomis.
- b. Tingkat efisiensi belanja lima tahun terakhir yaitu 2016 sampai dengan 2020 mengalami kenaikan dan penurunan namun tetap berada pada rata-rata diatas 100% yakni pada tahun 2016 sebesar 293,88%, tahun 2017 sebesar 300,43%, tahun 2018 sebesar 362,24%, tahun 2019 sebesar 227,90% dan tahun 2020 sebesar 256,63%. Dengan rata-rata rasio efisiensi diatas 100% rasio efisiensi memiliki resiko masuk pada kategori kurang efisien.
- c. Tingkat efektivitas Dinas PUPR Bina Marga Kabuapten Langkat pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 sampai tahun 2019 memiliki resiko masuk kategori kurang efektif karena rata-rata nilai berada di

antara 80-90%. Tetapi pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan sebesar 115,06%.

2. Batasan Masalah

Pembatasan permasalahan pada penelitian hanya dalam analisis kinerja keuangan pelaksanaan anggaran belanja yang bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi dan ekonomi atas pelaksanaan jalan dan jembatan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bina Marga Kabupaten Langkat tahun 2016-2020.

C. Rumusan Masalah

Mengacu terhadap pemaparan latar belakangnya itu berarti yang merupakan inti masalah pada penelitian yaitu:

- a. Apakah yang menyebabkan rasio ekonomis Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat pada tahun 2017, 2019 dan 2020 memiliki resiko kategori kurang ekonomis ?
- b. Apakah yang menyebabkan rasio efisiensi Dinas PUPR Bina Marga kabupaten Langkat pada tahun 2016-2020 memiliki resiko kategori kurang efisiensi?
- c. Apakah yang menyebabkan rasio efektivitas penggunaan belanja Dinas PUPR Bina Marga kabupaten Langkat pada tahun 2016-2020 memiliki resiko kategori kurang efektif ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukanya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penyebab rasio ekonomis Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat berada pada kategori kurang ekonomis
- b. Untuk mengetahui penyebab rasio efisiensi Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat berada pada kategori kurang efisiensi
- c. Untuk mengetahui penyebab rasio efisiensi Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat berada pada kategori kurang efektif

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini berdasarkan uraian latar belakang diatas sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis

Penelitiannya berikut bisa memperluas pemahaman mengenai efisiensi, keekonomisan, keefektivitasan hasil kerja keuangan atas pelaksanaan jalan dan jembatan mempergunakan metodenya yakni *value for money*

- b. Bagi Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat

Penelitian ini dapat menjadi informasi mengenai ekonomis, efisiensi serta efektivitas hasil kerja keuangan atas pelaksanaan jalan dan jebatan menggunakan metode *value for money*.

- c. Bagi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Untuk referensi para akademis maupun peneliti lainnya yang memiliki ketertarikan dalam menyelenggarakan penelitian lanjutan bahkan penelitian dalam aspek masalah yang serupa untuk masa mendatang.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Dian Annisa (2011) dengan judulnya “Evaluasi Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kota Makassar

Melalui Pendekatan *Value For Money*". Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Sari (2014) yang berjudul "Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan menggunakan Prinsip *Value For Money* (Studi Kasus Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2013)". Penelitian lainnya oleh Annafi Indra Tama (2017) yang berjudul "Perspektif *Value For Money* Dalam Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah". Sedangkan penelitian ini berjudul "Analisis Kinerja Keuangan Atas Pelaksanaan Jalan dan Jembatan Menggunakan Metode *Value For Money* Pada Dinas PUPR Bidang Bina Marga Kabupaten Langkat".

Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu:

1. Judul Penelitian

Peneliti terdahulu Dian Annisa (2011) meneliti kinerja keuangan Dinas Kesehatan Kota Makassar. Peneliti selanjutnya Sari (2014) meneliti APBD yang sebagai perencanaan dana pemerintahan daerah yang dipakai untuk dasar melaksanakan infrastruktur dalam wilayah itu. Peneliti lainnya Annafi Indra Tama (2017) meneliti hasil kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Prov. Jabar. Sedangkan penelitian ini meneliti kinerja Keuangan Pelaksanaan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bina Marga kabupaten Langkat dengan pengukuran 3E (ekonomis, efisiensi, dan efektivitas).

2. Waktu Penelitian

Penelitian terdahulu Dian Annisa dilakukan tahun 2011, Sari 2014 dan Annafi Indra Tama tahun 2017. Sedangkan penelitian ini dilakukan tahun 2020-2021.

3. Lokasi Penelitian

Tempat terdahulu Dian Annisa (2011) di Dinas Kesehatan Kota Makassar, Sari (2014) di Pemerintah Kabupaten Sumenep, Annafi Indra Tama (2017) di Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat. Sedangkan penelitian ini dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bina Marga Kabupaten Langkat

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Definsi Kinerja

Pendapat oleh Mangkunegara (2016) kata kinerja memiliki asalnya dari istilah *job performance* ataupun *actual performance* yakni prestasi yang sebetulnya diraih individu. Makna dari kinerja merupakan hasil dengan kuantitasnya maupun kualitasnya yang diperoleh dari individu karyawan ada pelaksanaan tugas selaras terhadap tanggung jawabnya Mangkunegara (2016).

Kinerja pendapat oleh Edison (2016) merupakan hasil tahapan berpacu serta dilakukan pengukuran saat periode waktunya didasarkan atas kebijakan yang sudah ditentukan.

Kinerja pendapat oleh Fahmi (2013) yakni hasil yang diperoleh organisasi yang bersifat mengutamakan keuntungan (*profit oriented*) dan tidak mengutamakan keuntungan (*non profit oriented*) yang didapat dalam satu periode waktu. Selain itu kinerja memiliki relasi erat terhadap tujuannya organisasi, rasa puas pelanggan, serta memberi dorongan serta kontribusi ekonomis dari hasil pekerjaan.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 (Bab I, Pasal 1:37) mengungkapkan penjelasan hasil kerja atau kinerja merupakan output atas aktivitas maupun program yang diraih berkaitan terhadap pemakaian anggaran yang mempunyai kualitas serta kuantitasnya terukur.

a. Tujuan Sistem Pungukuran Kinerja

Mardiasmo (2018) menyatakan tujuan ukuran hasil kerja atau kinerja merupakan hal yang memberi kemudahan interaksi strateginya dengan baik, pengukuran hasil kerja keuangan maupun non keuangan yang dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi secara berimbang dan menyediakan kebutuhan manajer baik manajer level menengah dan bawah untuk pemahaman dan motivasi untuk pencapaian *goal congruence* serta merupakan alat pencapaian rasa puas didasarkan atas pendekatan individu keterampilan berkolektif rasional.

Pendapat oleh Robertson (2002) pada penelitiannya Mahsun (2011) pengukuran kinerja yakni evaluasi atas tahapan *progress* tugas pada tujuan maupun target yang sudah ada, mencakup informasi terkait efektivitas pemakaian sumber dayanya untuk memperoleh produk maupun jasa, kualitasnya yang diserahkan kepada customer sudah puas, hasil aktivitas daripada hal yang diharapkan, serta efisiensi perilaku meraih tujuannya.

Ukuran hasil kerja atau kinerja merupakan bagian yang sangat penting dari sistem mengendalikan manajemen, yakni organisasi publik atau non publik. Tetapi dikarenakan sifat dan karakteristik dari organisasi publik tidak sama terhadap bagian non publik, aksentuasi dan orientasi pengukuran kinerjanya juga ada hal yang membedakan. Evaluasi hasil kerja pada sektor publik memiliki tujuan dilakukannya kegiatan tersebut, yaitu :

- 1) Mengetahui tingkat pencapaian dari tujuan organisasi
- 2) Mempersiapkan sarana pembelajaran pegawai
- 3) Mengoreksi kinerja pada periode berikutnya
- 4) Memberikan evaluasi yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian reward dan punishment
- 5) Membentuk akuntabilitas publik

b. Manfaat Pengukuran Kinerja

Sektor publik merupakan hal yang selalu terikat terhadap relasi umum berarti ukuran hasil kerja mutlak ini dibutuhkan guna mengetahui misi sektor publik yang dicapai dalam penyediaan jasa maupun barang umum. Tapi dalam pandangan pihak dalam organisasinya, ukuran hasil kerja pun berguna dalam memberi bantuan aktivitas manajerial setiap organisasi.

Manfaat pengukuran kinerja menurut Mardiasmo (2018) yaitu:

- 1) Memberi interpretasi tentang pengukuran yang dipakai dalam mengevaluasi hasil kerja manajemennya.
- 2) Memberi arah guna meraih target hasil kerjanya
- 3) Guna pemantauan serta evaluasi perolehan hasil kerja dan melakukan perbandingan terhadap target kinerjanya serta melaksanakan kegiatan mengoreksi guna melakukan perbaikan hasil kerja
- 4) Untuk dasar dalam memberi penghargaan serta *punishment* dengan rasional atas capaian prestasinya yang selaras terhadap sistem mengukur hasil kerja yang sudah ditentukan.

- 5) Menjadi alat interaksi untuk karyawan dan bos sebagai rangka perbaikan hasil kerja organisasi
- 6) Mampu mengetahui apakah kepuasan pelanggan telah terpenuhi
- 7) Mampu memahami proses kegiatan instansi pemerintah
- 8) Menguatkan pengambilan keputusan bahwa sudah dilakukan secara objektif.

c. Karakteristik indikator kinerja

Menurut Mahmudi (2015) indikator kinerja yang dilakukan pengembangan sebainya mempunyai ciri yakni simpel serta kemudahan memahami, bisa dilakukan pengukuran, dikuantifikasi, seperti pada wujud perbandingan rasio, maupun angka, serta persentase lalu dikaitkan dengan standar atau target kerja serta focus terhadap customer, kualitas, service dan efisiensi serta dikaju secara teratur.

d. Manfaat Indikator Kinerja

Informasi tentang kinerja begitu penting pada penciptaan pemerintahan yang bagus. Mahmudi (2015) menyatakan indikator kinerja berguna untuk mengukur baik atau tidak nya suatu organisasi. Informasi kinerja tersebut arahkan untuk acuan tidak untuk mengendalikan. Indikator hasil kerja memiliki peranan yakni sistem membentuk organisasi pengajaran.

Apabila organisasinya melaksanakan belajar secara menerus, cara untuk melakukan perbaikan hasil kerja, peningkatan rasa puas

konsumen dan meraih targetnya, berarti indikator hasil kerjanya pun bisa menggambarkan dorongan dan motivasi dalam cara yang positif.

2. Kinerja Keuangan

Pada Perpu No 58 Tahun 2014 terkait Pengelolaan Keuangan mengungkapkan kinerja keuangan merupakan refleksi atas kesuksesan yang dievaluasi didasarkan atas pengukuran nilai pada satuan nilai keuangan, yakni melalui perbandingan kenyataan finansial didasarkan atas keuangannya.

Menurut Fahmi (2011) kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dibuat untuk memperhitungkan seberapa jauh industri sudah melaksanakan melalui penggunaan peraturan penyelenggaraan keuangannya dengan baik serta tepat. Hasil kerja industri adalah pemaparan mengenai keadaan finansial industri dilakukan analisis menggunakan alat menganalisis finansial, berarti bisa dipahami terkait buruk ataupun baiknya kondisi finansial industri yang merefleksikan prestasi kerjanya. Hal tersebut adalah penting supaya sumber daya dipakai dengan maksimal untuk menangani lingkungan yang berubah.

3. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Sumarjo (2011) hasil kerja finansial atau keuangan Pemda merupakan hasil atas aktivitas yang sudah dilaksanakan atau diraih berkaitan terhadap pemakaian penganggaran setempat melalui kualitas serta kuantitasnya yang diukur, keterampilan wilayah bisa dinilai melalui mengevaluasi efektivitas layanan yang disajikan untuk warga.

Menurut Syamsi (2012) hasil kerja atau keuangan finansial Pemda merupakan keterampilan wilayah melakukan penggalan serta pengelolaan sumber dana asli wilayah pada pemenuhan kebutuhan untuk menunjang berlangsungnya sistem pemerintah, layanan umum serta infrastruktur wilayah yang tidak ada ketergantungan dengan penuh pada pemerintah pusatnya serta memiliki leluasa mempergunakan keuangan guna keperluan warga pada pembatasan yang ditetapkan dalam aturan UU.

a. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mardiasmo(2016) Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah dilakukan dalam pemenuhan tiga tujuannya yaitu:

- 1) Melakukan perbaikan hasil kerja Pemda
- 2) Memberi bantuan alokasi sumber dayanya serta penyusunan keputusan
- 3) Perwujudan tanggung jawab umum serta perbaikan hubungan lembaga.

Menurut Abdul Halim (2015) menyatakan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk digunakan sebagai tolak ukur dalam :

- 1) Menilai kemadirian keuangan daerah dalam membiyai penyelenggaraan otonomi daerah.
- 2) Pengukuran keefektivitasan serta keefisiensian pada merealisasikan pendapatan daerahnya.

- 3) Pengukuran seberapa jauh kegiatan Pemda melakukan pembelanjaan
- 4) Pengukuran sumbangsih tiap sumber penghasilan pada perwujudan penghasilan daerah.
- 5) Mengamati pertumbuhannya maupun perkembangannya penghasilan serta pengeluaran yang dilaksanakan dalam suatu periode.

4. Laporan Realisasi Anggaran

Hasil penelitian Rukayah, dkk (2017) menyimpulkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang menyediakan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakai sumber dana ekonomis yang dilakukan pengelolaan Pemda maupun pusat dengan penggambaran atas perbandingan penganggaran maupun kenyataan di periode laporan. Kegunaan data realisasi penganggaran yakni penyediaan informasi terkait kenyataan atas penghasilan, merealisasikan pembelanjaan, transfer, defisit, serta membiayai terhadap entitas laporannya daripada penganggaran. Informasinya itu bermanfaat untuk pemakai pelaporan pada penilaian keputusan terkait pengalokasian sumber daya akuntabilitas, kepatuhan entitas laporan, ekonomis melalui:

- a. Penyediaan informasi terkait sumbernya, pengalokasian, serta pemakaian sumber daya ekonomisnya
- b. Penyediaan informasi terkait realisasi penganggaran dengan keseluruhan yang bermanfaat untuk menilai hasil kerja

pemerintahan untuk efisiensi serta efektivitas pemakaian anggarannya

Kinerja keuangan pembelanjaan bisa dievaluasi bagus jika realisasinya tidak lebih besar dibandingkan penganggaran pembelanjaan. Didasarkan atas data dalam pelaporan Laporan Realisasi Anggaran, sehingga bisa menyusun untuk menganalisis anggaran terutama menganalisis Varians Belanja Daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), merupakan perencanaan keuangan dalam tahun pemerintahan Indonesia yang diberi persetujuan dari DPR. APBN mengandung list runtut serta rinci yang berisi perencanaan penerimaan maupun pengeluaran negara pada tahunan anggaran. APBN, perubahannya, serta pertanggungjawabannya di tiap tahunan ditentukan dari UU.

a. Fungsi APBN

APBN adalah instrumen guna pengaturan pendapatan maupun pengeluaran sebagai rangka pembiayaan penyelenggaraan aktivitas pemerintah maupun infrastruktur, tercapainya perkembangan ekonomis, peningkatan penghasilan nasional, tercapainya ekonomi yang stabil, serta memilih arah dan prioritas infrastruktur dengan umumnya. Fungsinya dari APBN yakni mengotorisasi, merencanakan, mengawasi, mengalokasi distribusi dan menstabilisasikan. Seluruh penerimaan yang merupakan hak serta pengeluaran adalah kewajiban negara pada tahunan anggaran perlu

dimasukkan pada APBN. Surplus penerimaan Negara bisa dipergunakan dalam pembiayaan pengeluaran negara tahunan anggaran selanjutnya.

b. Pelaporan dan Perencatatan APBN

Proses laporan serta catatan APBL dilakukan bersama proses penyelenggaraan APBN, persatu tahunnya 1 Januari hingga 31 Desember. Laporan keuangan pemerintahan diperoleh dengan tahapan akuntansi serta ditampilkan sejalan terhadap standarisasi akuntansi keuangan pemerintahan yang meliputi LRA, Laporan Arus Kas, pencatatan pelaporan keuangan, serta neraca.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan per-aturan daerah. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 tahun terhitung tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi ini menjadikan APBD penting karena kegiatan pemerintah daerah tidak dapat dilaksanakan jika tidak dicantumkan dalam APBD. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah, maka Daerah diberi kewenangan untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan daerahnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan setiap tahun oleh Pemerintah daerah merupakan alat utama untuk melaksanakan pembangunan daerah, dimana untuk pembiayaan pelaksanaan pembangunan tersebut tercermin dari alokasi besarnya pendapatan dan belanja daerah. Jika alokasi Pendapatannya daerahnya besar maka secara otomatis alokasi pembiayaan pembangunan dalam Belanja daerah juga menjadi besar sehingga prioritas pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik dan lancar. APBD merupakan instrumen penting bagi pemerintah dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

Oleh karena itu, APBD memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi otorisasi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- b. Fungsi Perencanaan. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Fungsi Pengawasan. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

d. Fungsi Alokasi. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

e. Fungsi Distribusi. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

f. Fungsi Stabilisasi. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian

7. Organisasi Sektor Publik

a. Pengertian Organisasi Sektor Publik

Pendapat oleh Mahsun (2014) organisasi sektor publik yakni organisasi yang mempunyai hubungan terhadap keperluan publik serta menyediakan produk maupun jasa untuk masyarakat yang dilakukan pembayaran dari perpajakan ataupun penghasilan negara, diberi pengaturan oleh hukum

b. Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Menurut Koufteros (2014) ukuran hasil kerja dibutuhkan dalam mengevaluasi akuntabilitas organisasi publik untuk memperoleh layanan publik yang bagus serta sesuai dengan sarannya.

Menurut Mahmudi (2010) pengukuran kinerja merupakan suatu hal penting untuk tahapan mengendalikan manajemen publik. Ada enam tujuan untuk mengukur hasil kerja atau kinerja publik yakni:

- 1) Supaya memahami tingkatan pencapaian tujuannya
- 2) Penyediaan sarana pengajaran karyawan
- 3) Perbaikan hasil kerja untuk masa selanjutnya
- 4) Pemberian pertimbangan yang runtut untuk membuat kebijakan penghargaan serta hukuman
- 5) Memberi motivasi karyawan
- 6) Penciptaan atas akuntabilitas publik.

c. Aspek-Aspek Pengukuran Sektor Publik

Mahsun, dkk (2011) menyebutkan bahwa organisasi sektor publik memiliki sifat maupun ciri yang tidak biasa, sehingga organisasi publik butuh pengukuran evaluasi hasil kerja yang meluas, tidak hanya tingkatan keuntungan, efisiensinya, serta tidak hanya pengukuran keuangan.

Pengukuran kinerja organisasi sektor publik mencakup komponen yaitu:

- 1) Kelompok masukan merupakan seluruh suatu hal yang diperlukan supaya penyelenggaraan aktivitas bisa berlangsung guna memperoleh output.
- 2) Kelompok proses yakni pengukuran aktivitas, dari sisi kecepatannya, ataupun tingkatan ketepatan penyelenggaraan aktivitas itu

- 3) Kelompok keluaran yakni sesuatu yang diinginkan langsung bisa diraih melalui aktivitas yang bisa berwujud ataupun tidak
- 4) Kelompok hasil yakni suatu hal yang merefleksikan fungsi output aktivitas dalam jangka menengah dan memiliki dampak langsungnya
- 5) Kelompok manfaat yakni sesuatu yang berhubungan terhadap tujuan akhirnya mengenai penyelenggaraan aktivitas
- 6) Kelompok dampak yakni pengaruh yang diciptakan, positif atau negatif.

8. *Value For Money*

Value for Money adalah ukuran hasil kerja dalam organisasi pemerintahan. Hasil kerja pemerintah perlu melakukan pertimbangan atas masukan, keluaran, outcome dengan bersamaan. Hal ini tidak dapat menilai kinerja pemerintah apa bila hanya dilakukan dari output yang dihasilkan saja. Terlebih lagi bagi keadaan tertentu dibutuhkan penambahan ukuran pendistribusian serta pencakupan layanan.

Sulitnya mengukur output merupakan masalah yang biasanya dialami pemerintahan, dikarenakan keluaran yang diperoleh tidak selalu memiliki wujud, namun biasanya tidak berwujud.

Ardilla (2015) menyatakan bahwa *Value For Money* adalah konsep dalam mengevaluasi hasil kerja publik tidak hanya diamati melalui komponen finansial, tapi pula bisa diamati melalui non finansial bagi

mengevaluasi tingkatan kesuksesan program kerja publik. konsep *value for money* adalah konsep dalam pengukuran ekonomis, efisiensi, efektivitas kinerja program, kegiatan dan organisasi. Konsep *value for money* merupakan bagian penting di organisasi publik maka acapkali disebutkan sebagai inti dari mengukur hasil kerja publik.

Menurut Mahmudi (2015) *Value for Money* adalah konsep penting didalam organisasi sektor publik yang memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang. *Value for Money* juga merupakan pengukuran kinerja yang digunakan oleh perusahaan publik.

Menurut Naim (2013) *value for money* adalah inti terhadap ukuran hasil kerja pada organisasi publik dikarenakan kinerja atau hasil kerja pemerintahan perlu memberi pertimbangan input, output, serta outcome dan tidak dapat mengevaluasi dari output yang diperoleh saja.

Berikutnya menurut Bastian (2011) *Value For Money* adalah proses yang mencakup evaluasi efektivitas, efisiensi, maupun ekonomis untuk mengukur hasil kerja.

Standar pokok yang mendasari kegiatan pelaksanaan manajemen publik sekarang ini adalah ekonomis, efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas publik. Tujuan yang diharapkan bagi warga pada tanggung jawab atas penyelenggaraan Value for Money, mencakup ekonomisnya pada pelaksanaan serta pengalokasian sumber daya, keefisienan pada penggunaan sumber daya yang pemakainya di minimalkan tetapi hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

a. Pengembangan Indikator *Value for Money*

Menyediakan informasi untuk pertimbangan sebagai pembuat keputusan merupakan peran indikator kinerja. Hal ini berarti bahwa suatu indikator akan memberikan ukuran pencapaian program yang akurat.

Indikator *Value for Money* dibagi menjadi dua bagian menurut (Mardiasmo, 2013) yaitu:

- 1) Indikator alokasi biaya (ekonomis dan efisiensi)
- 2) Indikator kualitas pelayanan (efektivitas)

Indikator kinerja harus bisa dimanfaatkan oleh pihak internal ataupun eksternal. Pihak internal bisa menggunakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan serta efisiensi biaya. Dengan maksud lain, indikator kinerja berperan untuk menunjukkan, memberikan indikasi atau mengkonsenkan perhatian pada bidang yang relevan dilakukan tindak perbaikan.

Pihak dari luar dapat menggunakan indikator kinerja tersebut sebagai alat control dan sekaligus sebagai alat informasi dalam tujuan mengukur tingkat akuntabilitas publik.pembuatan dan penggunaan indikator kinerja tersebut dapat membantu setiap pelaku utama dalam proses pengeluaran publik. Indikator kinerja akan membantu para manajer publik untuk memonitor pencapaian program dan mengidentifikasi masalah yang penting.

b. Pengukuran Kinerja *Value for Money*

Pengukuran kinerja merupakan evaluasi atau penilaian terhadap pencapaian pelaksanaan kegiatan suatu organisasi berdasarkan tujuan, sasaran, standard an kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Informasi mengenai hasil pengukuran ini juga menjadi referensi dalam penentuan standar kinerja untuk masa yang akan datang. Nilai besaran target yang menjadi acuan pencapaian pada periode berikutnya juga bertumpu pada hasil pengukuran kinerja yang dilakukan.

Mahmudi (2015) menyebutkan bahwa *Value for Money* merupakan konsep penting dalam organisasi sektor publik. Untuk mendorong kinerja sektor publik, diperlukan manajemen kinerja yang berorientasi pada *value for money*. Manajemen kinerja sektor publik tersebut harus dilengkapi dengan sistem pengukuran kinerja sektor publik juga harus di konsenkan untuk mengukur ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

Konsep *Value For Money* terdiri atas tiga elemen utama dalam teknik pengukuran kinerja nya, yaitu:

1) Ekonomis

Menurut Mahmudi (2015) Ekonomis terkait dengan pengkoversian input primer berupa sumber daya keuangan (Uang/kas) menjadi input sekunder berupa tenaga kerja, bahan, infrastruktur, dan barang modal yang dikonsumsi untuk kegiatan operasi organisasi. Konsep ekonomis sangat terkait dengan konsep biaya untuk memperoleh input.

2) Efisiensi

Pendapat oleh Mahmudi (2015) Efisiensi mengenai relasi diantara keluaran mencakup produk maupun layanan yang diperoleh melalui sumber daya yang dipakai guna mendapatkan keluaran itu. Dengan matematisnya, keefisienan adalah rasio diantara keluaran dengan masukan, sebutan lainnya yakni *output* perunit *input*. Dalam progra, organisasi, aktivitas disebut efisien jika bisa memperoleh keluaran melalui masukan yang rendah, atau input tertentu bisa memperoleh keluaran yang maksimal. Konsep efisiensi pun berkenaan terhadap produktivitas. Produktivitas adalah rasio diantara masukan dan keluaran. Pengukuran efisiensi dilaksanakan melalui perbandingan realisasi pembelanjaan dan standarisasi pembelanjaan. Penentuan standarisasi pembelanjaan itu sebelumnya pun perlu ada pertimbangan komponen ekonomisnya dan standarisasi layanan umum minimumnya terpenuhi.

3) Efektivitas

Menurut Mahmudi (2015) Efektivitas mengenai relasi diantara hasil yang diinginkan dan hasil yang sebetulnya diraih. Efektivitas adalah relasi diantara keluaran dan tujuannya. Makin tinggi sumbangsih keluaran untuk mencapai tujuannya, berarti makin efektif organisasinya, program, maupun kegiatannya. Apabila ekonomis memiliki fokus terhadap masukan serta efisiensi terhadap keluaran ataupun proses, berarti efektivitas mempunyai fokus

terhadap hasilnya. Dalam program, organisasi, aktivitas disebut efektif jika keluaran yang diperoleh mampu mencakup tujuan yang diinginkan, atau disebutkan *spending wisely*.

Dikarenakan keluaran yang diperoleh organisasi publik lebih banyak mempunyai sifat keluaran tidak ada wujud yang sulit dilakukan kuantifikasi, berarti mengukur efektivitas biasanya sulit dilakukan. Sulitnya mengukur efektivitas ini yaitu dikarenakan peraih hasil acapkali tidak dapat dipahami di jangka pendeknya, namun jangka panjang sesudah program selesai, maka pengukuran efektivitas umumnya disebutkan dengan kualitatif di bentuk pernyataannya saja.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 *Mapping* Penelitian Sebelumnya

No	Nama/Tahun	Judul	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Eka Febyanti Rahayu (2020)	Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value For Money Pada Distrik Navigasi Kelas II Banjarmasin Tahun 2016-2019.	Deskriptif Kuantitatif	Hasil analisis penelitian menunjukkan untuk tingkat ekonomis selama 4 tahun menunjukkan hasil kinerja pada tahun 2016-2019 bernilai cukup ekonomis dan ekonomis. Pada tingkat efisiensi selama 4 tahun menunjukkan kinerja pada tahun 2016-2019 menunjukkan hasil tingkat kinerja yang kurang efisien. Sedangkan tingkat efektivitas selama 4 tahun menunjukkan kinerja pada tahun 2016-2019 menunjukkan hasil yang sangat efektif

No	Nama/Tahun	Judul	Metode Analisis	Hasil Penelitian
2	Yuyun Novita Sari (2020)	Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dengan Prinsip <i>Value For Money</i> (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan)	Deskriptif Kuantitatif	Kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan dengan metode <i>value for money</i> yang diukur dengan rasio ekonomi, rasio efisiensi dan rasio efektivitas untuk tahun 2014 sampai tahun 2018 mengalami penurunan, hal ini terjadi dikarenakan tidak tercapainya target atas Pendapatan Daerah, dan juga meningkatnya jumlah Belanja Daerah Kota Medan, dimana realisasi belanja daerah Kota Medan lebih besar dibandingkan dengan pendapatan daerah, hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan mengalami defisit atau kerugian. Rasio ekonomi ditahun 2014 sampai tahun 2018 cenderung mengalami penurunan, Penurunan yang terjadi pada rasio ekonomi pendapatan daerah tidak baik, hal ini terjadi dikarenakan besarnya jumlah belanja atas pemungutan pendapatan daerah pada Pemerintah Daerah Kota Medan, dengan menurunnya rasio ekonomi ini menunjukkan bahwa penggunaan dalam biaya pemungutan pendapatan daerah kurang ekonomis pada Pemerintah Daerah Kota Medan. Sedangkan untuk rasio efektivitas pajak daerah ditahun 2014 sampai tahun 2018 mengalami fluktuatif, hanya tahun 2018 rasio efektivitas mengalami peningkatan. Rasio efektivitas untuk tahun 2014, 2015 dan tahun 2018 dikategorikan cukup efektif, dan pada tahun 2016 dan 2017 berada pada ketegori kurang efektif. Penurunan yang terjadi untuk rasio efektivitas atas pendapatan daerah, menunjukkan bahwa kinerja dari pendapatan daerah

No	Nama/Tahun	Judul	Metode Analisis	Hasil Penelitian
				mengalami penurunan atas memaksimalkan pendapatan daerah Pemerintah Kota Medan. Rasio efisiensi daerah ditahun 2014 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan dan penurunan, tetapi untuk tahun 2015 dan 2016 rasio efisiensi mengalami peningkatan, peningkatan yang terjadi pada rasio efisiensi tidak baik, hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah Kota Medan tidak mampu dalam mengefisienkan biaya yang dikeluarkan atas pendapatan daerah Kota Medan.
3	Diah Arganty Patompo dan Victorya Untu (2019)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2013-2016	Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, rasio efektivitas dapat dikategorikan tidak efektif, rasio efisiensi tergolong tidak efisien, rasio keserasian menunjukkan lebih banyaknya realisasi belanja operasi daripada belanja modal, hal ini kurang begitu baik. Rasio pertumbuhan menunjukkan pertumbuhan yang positif tiap tahunnya, dan rasio kemandirian tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk instruktif yang menunjukkan bahwa peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dapat lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
4	Mulyanigtyas (2018)	Analisis Kinerja Keuangan Kota Mojokerto Dengan Pendekatan <i>Value For Money</i>	Deskriptif Kuantitatif	Hasil menganalisis menandakan yakni hasil kerja keuangan BPPKA Kota Mojokerto di 2013 ada di kategori cukup ekonomis, cukup efisien, serta sangat efektif. Dalam anggaran 2014 kriterianya dalam evaluasi hasil kerja keuangan yakni kurang efisien, cukup ekonomis, serta tidak efektif. Lalu dalam anggaran 2015, evaluasi hasil kerja keuangan ada di kategori

No	Nama/Tahun	Judul	Metode Analisis	Hasil Penelitian
				sangat efektif, cukup ekonomis, serta kurang efisien.
5	A.H.R.Pangkey, I.S.Saerang dan J.E.Tulung (2017)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2011-2015	Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan, Rasio Kemandirian PAD menunjukkan tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah. Rasio tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal pemerintah daerah masih rendah namun dilihat dari Rasio Efektifitas PAD tingkat Efektifitas pengelolaan keuangan daerah terbilang sangat efektif dan dari rasio keserasian belanja daerah menunjukkan keseimbangan antar belanja masih belum seimbang. Penyebabnya adalah potensi yang dimiliki masih kurang dikelola oleh pemerintah. Jika potensi-potensi berhasil di maksimalkan, maka pajak yang merupakan penopang utama PAD akan semakin meningkat, dan akan menjadi tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat, agar masyarakat dapat menikmati setiap pembangunan fisik yang disediakan pemerintah daerah.
6	Firda Rahmadhany Arief, Yessi Muthia Basri dan Novita Indrawati (2017)	Analisis Kinerja Pemerintah Provinsi Riau Berdasarkan Value For money	Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Riau untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditinjau dari perspektif ekonomi menunjukkan hasil rasio ekonomi PAD Provinsi Riau tahun 2011 adalah "cukup ekonomis", rasio ekonomi PAD Provinsi Riau tahun 2012 sampai dengan 2014 adalah "kurang ekonomis" dan tahun 2015 adalah "tidak ekonomis". Rasio efisiensi PAD Provinsi Riau tahun 2011 sampai dengan 2015 adalah "sangat efektif" Rasio efektivitas PAD Provinsi Riau tahun 2011, 2012 dan 2014 adalah "sangat efektif", sedangkan tahun 2013 dan 2015 adalah "efektif". Rasio efisiensi Belanja Daerah Provinsi Riau tahun 2011 sampai dengan 2015 adalah "tidak efektif". Rasio

No	Nama/Tahun	Judul	Metode Analisis	Hasil Penelitian
				<p>efektifitas Belanja Daerah Provinsi Riau pada tahun 2011, 2012 dan 2013 adalah “cukup efektif”, kemudian tahun 2014 dan 2015 adalah “kurang efektif”. Rasio efektifitas Pembiayaan Daerah Provinsi Riau pada tahun 2011 adalah “efektif”, sedangkan pada tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015 adalah “sangat efektif”. Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Riau untuk meningkatkan kinerja keuangan diantaranya adalah dengan melakukan peningkatan pelayanan di bidang pajak untuk meningkatkan PAD, melakukan penghematan anggaran berupa pemberian insentif dalam upaya efisiensi dan efektifitas Belanja Daerah dan melakukan penanaman modal untuk optimalisasi Pembiayaan Daerah.</p>
7	Dian Septianita (2016)	<p>Analisis <i>Value For Money</i> Dalam Mengukur Kinerja Uasa Jamur Tiram (Pleurotus Ostreatus)</p>	<p>Metode Analisis Statistik Deskriptif</p>	<p>Melalui hasil penelitiannya terhadap Usaha Tani Jamur Di Desa Tanjung Rawo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang kesimpulannya yakni, rerarta biaya produksi yang dilakukan dari petani sejumlah Rp. 7.932.914, rerata penghasilan yang didapatkan petani yakni Rp. 19.500.000,00, rerata penghasilan yang diperoleh petani yakni Rp. 11.576.086/Ut. R/C rasio menandakan nilai 2,46. Mengacu terhadap kriterianya R/C Ratio melebihi 1 bermakna usaha tani itu efisien serta memberi untung.</p>
8	Farida Febriana (2016)	<p>Evaluasi Kinerja Keuangan dan Non Keuangan Berbasis <i>Value For Money</i> Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kabupaten Lamongan</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kabupaten Lamongan telah menjalankan keseluruhan program baik pada bidang industri, perdagangan secara ekonomis, karena selama tahun 2013-2015 tidak pernah melebihi dari dana yang dianggarkan, dan untuk kinerja non keuangan mempunyai nilai efisien, dan efektif, kecuali pada tahun 2015 pada bidang</p>

No	Nama/Tahun	Judul	Metode Analisis	Hasil Penelitian
				perdagangan untuk kinerja non keuangan tidak efektif.
9	Isna Ardila (2015)	Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan <i>Value For Money</i> Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi	Deskriptif Kuantitatif	Di 2010 hingga 2013, analisis perbandingan ekonomis ada kenaikan sejumlah 102.27% yakni melebihi 100%, ini menandakan yakni penggunaan penganggaran pembelanjaan tidak ekonomis. Analisis perbandingan efisiensi terdapat kenaikan sejumlah 107.69% melebihi 100%, menandakan yakni pada pemakaian keuangan penganggaran pembelanjaan dalam meraih program kerja masih belum sesuai. Sementara dalam perbandingan efektivitas ada kenaikan sejumlah 72.05% kurang dari 100%, telah terpenuhi standarisasi efektivitas.
10	Putri Riskitta Aamalia (2015)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Konsep Value For Money di Pemerintah Kota Ternate	Deskriptif Kuantitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata kinerja keuangan pemerintah Kota Ternate memenuhi kriteria "Ekonomis" dilihat dari sisi ekonomisnya, kriteria "efektif" apabila diamati dari sisi efektivitasnya, dan kriteria "sangat efisien" bila dilihat dari sisi efisiennya. Sehingga disarankan agar pemerintah Kota Ternate untuk meningkatkan kinerja keuangannya agar dapat lebih efektif, demi tercapainya kualitas value for money dalam pengelolaan anggaran pemerintah Kota Ternate.
11	Sebastian Nicola (2015)	Analisis Kinerja Keuangan Melalui Pendekatan <i>Value For Money</i> Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara	Kuantitatif	Hasil dari penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Dinas Perhubungan Sumatera Utara periode tahun 2016-2020 dilihat dari segi rasio ekonomis dinilai baik. Kinerja keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2014-2016 jika dilihat dari segi rasio efisiensi dinilai tidak baik. Kinerja Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2014-2016 jika dilihat dari segi efektivitas dinilai tidak baik

No	Nama/Tahun	Judul	Metode Analisis	Hasil Penelitian
12	Wiryawan Wira(2014)	Analisis Kinerja Keuangan Pada Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bintan Dengan Menggunakan Konsep Vaule For Money	Deskriptive Kuantitative	Hasil penelitian ini menunjukkan untuk tingkat ekonomi dan efisiensi telah tercapai, Dinas Sosial Kabupaten Bintan dapat mencapai hasil yang sangat efisien dan ekonomis. Namun, tingkat efektivitas program masih kurang sehingga dapat disimpulkan efektivitas dari program – program yang langsung menyentuh masyarakat belum maksimal.
13	Taufik Kurrohman (2013)	Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Kinerja Keunagan Yang Berbasis Value For Money Di Kabupaten/Kota Di Jawa Timur	Deskriptif Kuantitatif	Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah daerah lebih ekonomis dan efisien dalam pengelolaan keuangannya setelah menggunakan anggaran berbasis kinerja
14	Wahyu Sapto Rini(2013)	Analisis Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin Dengan Konsep <i>Value For Money</i>	Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk program jaminan kesehatan masyarakat, jaminan kesehatan daerah, jaminan kesehatan provinsi masih belum berjalan secara ekonomis. Sedangkan untuk obat-obatan asuransi kesehatan sudah berjalan dengan irit. Untuk tingkat efisiensi, program jaminan kesehatan masyarakat sudah masuk kategori efisien. Asuransi kesehatan area cukup efektif dalam kategori ini. Asuransi kesehatan provinsi dan obat-obatan asuransi kesehatan sangat efisien dalam kategori ini. Bidang program jaminan kesehatan termasuk dalam kategori cukup efektif. Asuransi kesehatan provinsi dan obat-obatan asuransi kesehatan masih belum berfungsi secara efektif.
15	Dian Annisa (2011)	Evaluasi Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kota Makassar Melalui Pendekatan Value For Money	Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitiannya menandakan dalam peningkatan yang ekonomis serta efisien, Dinkes Makassar bisa meraih hasilnya cukup baik. Tapi dalam peningkatan keefektivitasan terbilang kurang, dikarenakan berdasarkan atas tingkatan rasa

No	Nama/Tahun	Judul	Metode Analisis	Hasil Penelitian
				puas warga yang belum optimal.

Sumber: Data yang Dikumpulkan Penulis (2021)

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah sintesis terhadap rangkaian teori yang tercantum di tinjauan pustaka, hasil penelitian yang telah ada, tujuan penelitiannya, dan rangkaian masalah yang diungkapkan. Pengukuran Kinerja khususnya kinerja keuangan adalah alat untuk manajemen dalam mengevaluasi kesuksesan organisasinya.

Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat merupakan salah satu organisasi sektor publik yang program kegiatannya, antara lain program infrastruktur jalan serta jembatan, perawatannya dan program pemeriksaan dan peningkatan sara dan prasarana kebinamargaan. Dinas PUPR Bina Marga sering dinilai hanya berdasarkan aspek *input* dan *output* saja sehingga instansi akan dinilai cukup berhasil jika dapat menyerap anggaran 100% dalam pelaksanaan program tahunan, tanpa ada penilaian terhadap aspek *outcome* (hasil), *benefit* (manfaat), serta *impact* (dampak).

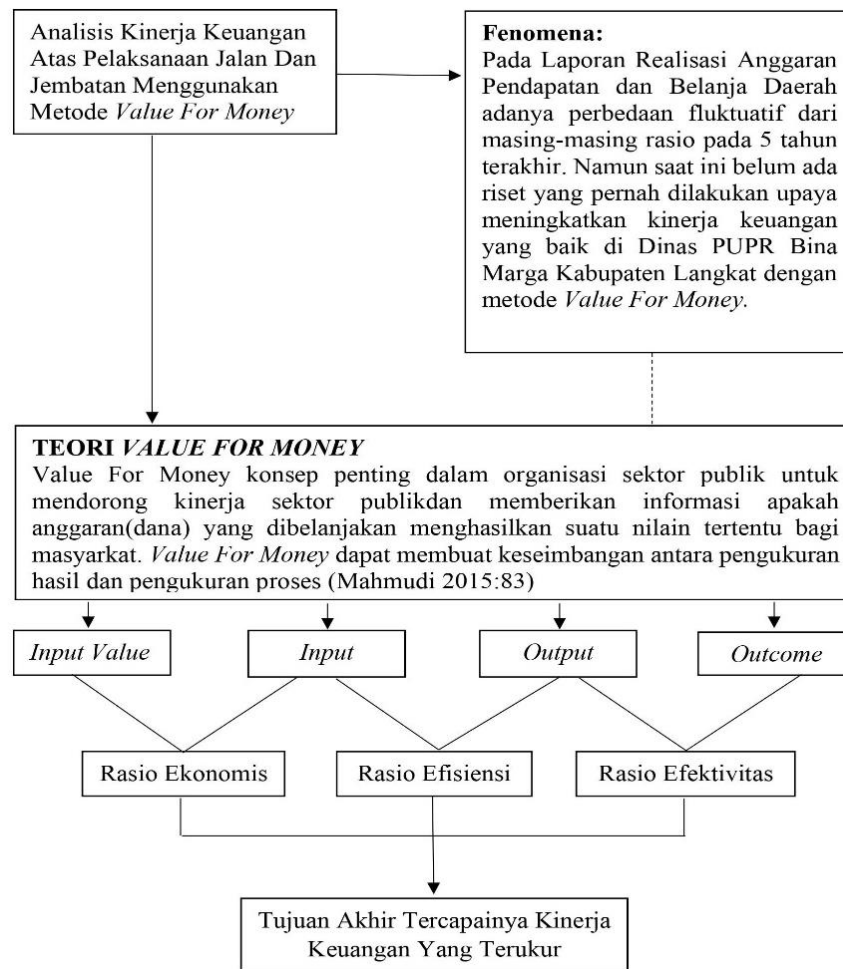
Tolak ukur dalam menganalisis kinerja keuangan pada Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat bisa mempergunakan konsep yang disebut sebagai 3E yakni Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas.

Menurut Mahmudi (2015) rasio ekonomis adalah mengukur biaya *input* (*cost of input*) ukuran ekonomi berupa anggaran yang dialokasikan terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat menghindari pengeluaran yang tidak produktif.

Mahmudi (2015) menyatakan bahwa efisiensi merupakan perbandingan keluaran(output) atau masukan (input) yang dikaitkan dengan target atau kinerja yang telah ditetapkan.

Pendapat oleh Mahmudi (2015) perbandingan efektivitas adalah relasi diantara keluaran dan tujuannya, makin tinggi kontribusi organisasi maka tingkat keberhasilan suatu program dengan target yang telah ditetapkan maka dinilai efektif.

Melalui penggunaan beragam perbandingan itu, bisa dipahami yakni hasil kerja Keuangan Dinas PUPR Bina Marga Kab. Langkat. Apabila seluruh perbandingan tersebut menandakan nilai yang sejalan terhadap targetnya, berarti hasil kerja Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bina Marga Kabupaten Langkat dapat dikatakan baik. Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut untuk mengukur seberapa ekonomis, efisien dan efektifnya kinerja keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bina Marga Kabupaten Langkat dengan menggunakan metode value for money dapat dilihat dalam kerangka konseptual dibawah ini:



2.1 Gambar Kerangka Konseptual

Sumber : Diolah Penulis, 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat yang berupa data-data jumlah anggaran pendapatan belanja dan realisasi keuangan Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas bagi penulis untuk menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat.

2. Waktu Penelitian

Proses penelitian dilakukan mulai November 2020 sampai dengan Agustus 2021.

Tabel 3. 1 Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	Waktu (Bulan) 2020-2021																							
		Nov'20				Des'20				Maret-April'21				Mci-Juli'21				Juli-Agust'21				Sept-November'21			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Riset awal/Pengajuan Judul																								
2	Penyusunan Proposal																								
3	Bimbingan Proposal																								
4	Seminar Proposal																								
5	Perbaikan/Acc Proposal																								
6	Penyusunan Skripsi																								
7	Bimbingan Skripsi																								
8	Jadwal Meja Hijau																								

Sumber: Oleh Penulis (2021)

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi menurut manullang dan pakpahan (2014) adalah “Suatu kelompok dari elemen penelitian, dimana elemen adalah unit terkecil yang merupakan sumber dari data yang diperlukan”. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Dinas PUPR Bina Marga kabupaten Langkat.

2. Sampel

Sugiyono dalam Rusiadi, *et al* (2014) mendefinisikan sampel adalah “ Bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat Tahun 2016-2020.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang berupa angka-angka yang termuat dalam APBD dan Laporan Realisasi Keuangan Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Langkat tahun 2016-2020.

2. Sumber Data

Data yang diambil oleh peneliti fokus pada tahun 2016-2020. Sumber data yang diambil oleh peneliti yaitu:

a. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung. Sumber data sekunder yang digunakan peneliti adalah berupa data dokumentasi yaitu jumlah hasil dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, realisasi pendapatan dan belanja daerah dan laporan realisasi keuangan anggaran belanja Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat Tahun 2016-2020.

b. Data Primer

Sumber data primer diperoleh secara langsung melalui media perantara. Data dalam penelitian ini berupa gambaran umum Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat yang diperoleh melalui media internet.

E. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah *Value For Money*. *Value For Money* merupakan konsep pengukuran kinerja keuangan atas pelaksanaan anggaran pada Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat yang berdasarkan tiga elemen yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

2. Definisi Variabel

Tabel 3. 2 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Deskripsi	Indikator	Skala
Pengukuran Kinerja Keuangan Metode <i>Value For Money</i> (Mahmudi, 2016:)	Konsep 3E: a. Ekonomis % perbandingan realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran <100% b. Efisiensi % perbandingan realisasi anggaran belanja untuk memperoleh anggaran belanja dengan realisasi pendapatan <100% c. Efektivitas % perbandingan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan >100%	Suatu proses penelitian yang dilakukan untuk menilai kemajuan pekerjaan dan kinerja keuangan terhadap sasaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui alat ukur yang yang berdasarkan tingkat ekonomis, efisiensi dan efektivitas.	Rasio

Sumber: Penulis, 2021

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Studi Pustaka

Pengumpulan data melalui studi pustaka dilakukan dengan mengkaji literature dan jurnal ilmiah untuk memperoleh landasan teoritis yang kuat dan menyeluruh tentang mengukur kinerja keuangan pemerintah dengan menggunakan *value for money*.

2. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data dengan melakukan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen dan

catatan-catatan yang ada pada Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat.

Data yang didapat dari metode ini adalah mengenai laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Dinas PUPR Bina Marga kabupaten Langkat dan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Anggaran Belanja APBD tahun 2016-2020. Selain itu berupa gambaran umum, struktur organisasi beserta tugas dan fungsi pokok pada masing-masing kedudukan dan kepegawaian.

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif (*Descriptive Kuantitative Analysis Method*) yaitu dengan mengumpulkan data, disusun, diinterpretasikan, dan dianalisis sehingga memberikan kesimpulan yang jelas dan objektif terhadap masalah yang ada yaitu mengenai kinerja keuangan Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat menggunakan metode *value for money* dengan konsep yang dikembangkan dalam keuangan terdiri dari Rasio Ekonomis, Rasio Efisiensi, dan Rasio Efektivitas.

Berikut ini teknik analisis data yang digunakan pada masing-masing elemen:

1. Rasio Ekonomis

Menurut Mahsun (2016:182) rasio ekonomis merupakan ukuran relative. Dimana rasio ekonomis merupakan perbandingan antara pengeluaran instansi dan anggaran yang telah ditetapkan. Untuk mengukur tingkat ekonomis memerlukan data anggaran dan realisasinya, sehingga

dapat mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran yang dilakukan instansi. Rasio ekonomis dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Input}}{\text{Input Value}} \times 100\%$$

Keterangan:

Input : Realisasi Anggaran Kinerja Keuangan

Input Value : Anggaran yang ditetapkan pada setiap kegiatan

Kinerja pada Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat dianggap ekonomis apabila *input* lebih kecil dari pada *input value*, yang berarti dana realisasi yang digunakan jumlahnya lebih kecil dari anggaran yang telah dianggarkan dengan maksud setiap kegiatan dapat menghemat atau mengurangi biaya yang tidak diperlukan serta tidak ada pemborosan.

Tabel 3. 3 Kriteria Tingkat Rasio Ekonomis Kinerja Keuangan

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
>100%	Tidak Ekonomis
90% - 100%	Kurang Ekonomis
80% - 90%	Cukup Ekonomis
60% - 80%	Ekonomis
<60%	Sangat Ekonomis

Sumber : Mahsun (2016)

2. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi menggambarkan suatu pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Menurut Mahsun (2016) efisiensi diukur dengan rasio antara *output* dan *input*. Rasio efisiensi tidak dinyatakan

dalam bentuk absolute tetapi dalam bentuk yang relative. Rasio efisiensi dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

Keterangan :

Output : Realisasi belanja

Input : Anggaran Belanja

Kinerja pada Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat dianggap efisiensi apabila hasil yang dicapai lebih besar dari pada realisasi yang digunakan, dengan maksud dana realiasasi yang di berikan bisa menghasilkan hasil yang dicapai lebih besar dengan kata lain suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan meggunakan dana yang serendah-rendahnya dan sumber daya yang ada.

Kriteria efisiensi jika memperoleh nilai kurang dari 100% maka dianggap efisiensi, jika memperoleh nilai sama dengan 100% maka dianggap efisiensi seimbang dan jika nilai yang diperoleh lebih dari 100% maka dianggap tidak efisiensi

Tabel 3. 4 Kriteria Tingkat Rasio Efisiensi Kinerja Keuangan

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
>100%	Tidak Efisiensi
90% - 100%	Kurang Efisiensi
80% - 90%	Cukup Efisiensi
60% - 80%	Efisiensi
<60%	Sangat Efisiensi

Sumber : Mahsun (2016)

3. Rasio Efektivitas

Efektivitas (hasil guna) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dan *output*, untuk mengukur tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan dengan melihat perbandingan anggaran pendapatan dengan realisasi dan tingkat pencapaiannya.

Mahmudi (2016) Kinerja efektivitas suatu kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bina Marga Kabuapten Langkat dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Keterangan :

Outcome : Realisasi Pendapatan

Output : Anggaran Pendapatan

Kinerja kegiatan pada Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat dikatakan efektif apabila *output* lebih besar dari pada *outcome*, berarti bahwa hasil yang dicapai bisa melebihi dari tujuan atau target yang hendak dicapai.

Jika kriteria efektivitas memperoleh nilai kurang dari 100% maka dianggap tidak efektif, jika memperoleh nilai sama dengan 100% maka dianggap seimbang dan jika memperoleh nilai lebih dari 100% maka dianggap sangat efektif.

Tabel 3.5. Kriteria Rasio Efektivitas Kinerja Keuangan

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Mahsun (2016)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Perkembangan Perusahaan

Sejarah Pekerjaan Umum di Pemerintahan Pusat, dalam perkembangan waktudalam tahapan-tahapannya sejak zaman penjajahan pemerintahan Belanda, dimana istilah “Pekerjaan Umum” berasal dari terjemahan istilah bahasa Belanda “Openbare Warken”. Pada zaman Hindia Belanda disebut “Waterstaat swerken“, dilingkungan Pusat Pemerintahan di bina oleh Departement Van Verkeer & Waterstaat (Dep. V & W).

Dibidang Pekerjaan Umum pada tiap-tiap wilayah organisasi pemerintahan Militer Jepang, diperlukan organisasi zaman Hindia Belanda namun disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dari pihak Jepang. Maka kantor pusat “V & W”, di Bandung, dinamakan “Kotubu Bunsitsu”, oleh pihak jepang, dan mulai saat itu istilah “Pekerjaan Oemoem” (P.O), Oesoesan Pekerjaan Oemoem(O,P,O), “Pekerjaan Umum” (PU), disamping “dobuku” lazim dipergunakan. Setelah Indonesia memproklamirkan Kemerdekaan pada tanggal 17-8-1945, maka semenjak itu pemuda-pemuda Indonesia mulai berangsur-angsur merebut kekuasaan Pemerintahan dari tangan Jepang baik di pusat pemerintahan (Jakarta/Bandung maupun Pemerintahan daerah-daerah). Pekerja Umum pada waktu itu(1945) berpusat di Bandung, dengan mengambil tempat berkas gedung V & W(dikenal dengan nama “Gedung Sate”).

Ketika Belanda ingin mengambil kekuasaan Pemerintahan di Hindia Belanda sebelumnya perang datang mengikuti Tentara Sekutu masuk ke Indonesia. Akibat dari keinginan Pemerintahan Belanda ini, terjadilah pertentangan fisik dengan Pemuda Indonesia yang ingin mempertahankan tanah air berikut gedung-gedung yang telah didudukinya, antara lain “Gedung Sate” yang telah menjadi Gedung Departemen Pekerja Umum waktu itu (peristiwa bersejarah itu dikenal dengan peristiwa “3 Desember 1945”).

Dalam masa prolog G 30S /PKI terjadilah dalam sejarah Pemerintahan RI suatu Kabinet DwiKora atau Kabinet 100 Menteri, dimana pada masa itu dibentuk Koordinator Kementrian, Tidak Luput Departemen PUT. Yang pada masa itu ikut mengalami perubahan organisasi menjadi 5 Departemen dibawah Komprtemen PUT kabinet DwiKora dipimpin Jendral Suprajogi.

Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Langkat awalnya bertempat di Kota Binjai lalu pindah ke Kota Stabat Tahun 1984 setelah Masa Kepemimpinan soeharto, dan Pada Masa Kepemimpinan Jokowi Pada Tahun 2017 Ditambahlah Penempelan Nama Menjadi ” Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat”.

a. Makna Logo dan Identitas Perusahaan



Gambar 4.1 Logo Pemkab Langkat

Keterangan Gambar :

1. Sebuah bintang berwarna emas dan kuning gading melambangkan dasar falsafah Bangsa Indonesia yaitu Pancasila.
2. Perisai berwarna kuning gading dan dua buah bambu kuning melambangkan perjuangan rakyat Bangsa Indonesia mencapai Kemerdekaan berdasarkan Pancasila.
3. Untaian padi dan kapas (17 dan 8) melambangkan tanggal 17 bulan 8 tahun 1945 dan keseluruhannya melambangkan Kesejahteraan Bangsa Indonesia.
4. tapak sirih warna coklat muda dan perhiasannya melambangkan kebudayaan dan adat istiadat rakyat Kabupaten Langkat.
5. Sampan nelayan dengan layar warna coklat muda dan badannya warna hitam melambangkan bahwa daerah Langkat berpantai luas rakyat bersemangat bahari.
6. Keris berwarna putih dan gagangnya berwarna coklat tua, melambangkan semangat patriotisme rakyat langkat.
7. Pita berwarna merah dan tulisan "Kabupaten Langkat" berwarna putih melambangkan Daerah Kabupaten Langkat.
8. Sebuah bintang berwarna emas dan kuning gading melambangkan dasar falsafah Bangsa Indonesia yaitu Pancasila.
9. Perisai berwarna kuning gading dan dua buah bambu kuning

melambangkan perjuangan rakyat Bangsa Indonesia mencapai Kemerdekaan berdasarkan Pancasila.

10. Untaian padi dan kapas (17 dan 8) melambangkan tanggal 17 bulan 8 tahun 1945 dan keseluruhannya melambangkan Kesejahteraan Bangsa Indonesia.
11. tapak sirih warna coklat muda dan perhiasannya melambangkan kebudayaan dan adat istiadat rakyat Kabupaten Langkat.
12. Sampan nelayan dengan layar warna coklat muda dan badannya warna hitam melambangkan bahwa daerah Langkat berpantai luas rakyat bersemangat bahari.
13. Keris berwarna putih dan gagangnya berwarna coklat tua, melambangkan semangat patriotisme rakyat langkat.
14. Pita berwarna merah dan tulisan "Kabupaten Langkat" berwarna putih melambangkan Daerah Kabupaten Langkat.

Pengertian Warna :

- a) Hijau : Lambang Kemakmuran (dasar lambang).
- b) Kuning Emas : Lambang Kebesaran Jiwa dan Kemurnian Adat.
- c) Kuning Gading : Lambang Kejayaan.
- d) Merah : Lambang Semangat yang Menyala-nyala.
- e) Biru : Lambang Kecintaan dan Kesetiaan pada tanah air.
- f) Putih : Lambang kesucian dan Kemakmuran.
- g) Coklat : Lambang Kepribadian dan Kesuburan tanah Langkat.

h) Hijau : Lambang Kejujuran dan Keteguhan.



Gambar 4.2 Logo Dinas PUPR Kabupaten Langkat

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Langkat

Keterangan Gambar :

Menggambarkan fungsi dan peranan Departemen Pekerjaan Umum dalam pembangunan dan Pembinaan prasarana guna memanfaatkan bumi dan air serta kekayaan alam bagi kemakmuran rakyat, berlandaskan Pancasila.

b. Visi dan Misi Perusahaan

Visi:

Terwujudnya Infrastruktur Yang Memadai, Terpadu, Dan Berwawasan Lingkungan.

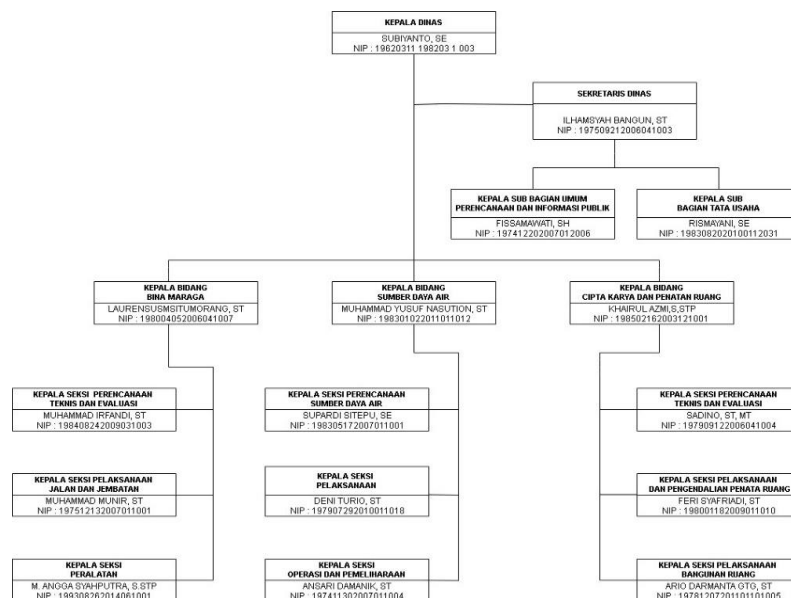
Misi:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur Yang Profesional.
2. Mewujudkan Pembangunan Sesuai Prioritas Kebutuhan Masyarakat Banyak.
3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas, Terpadu Dan Selaras.

c. Uraian Struktur Organisasi Perusahaan

Setiap Perusahaan pasti memiliki struktur organisasi, hal ini sangat penting bagi instansi atau perusahaan agar mempermudah dalam melakukan koordinasi dan bagian kegiatan berkaitan dalam penyelesaian suatu hal yang telah dipercayakan kepada satu orang, sehingga dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan fungsi dan wewenangnya.

Struktur organisasi juga diharapkan dapat menetapkan sistem hubungan dalam organisasi dengan tercapainya komunikasi dan integritas secara efisien dari segenap kegiatan. Adapun bentuk Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat yaitu sebagai berikut :



Gambar 4.3 Struktur Organisasi

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Langkat

d. Pembahasan Kegiatan Perusahaan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat (Perda) Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat, Dinas PUPR Kabupaten Langkat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan membawahi 1 (satu) Bidang Sekretaris, 4 (empat) Bidang, 2 (dua) Sub, 8 (delapan) Seksi serta kelompok jabatan fungsional dengan uraian sebagai berikut:

1) Kepala Dinas

Adapun uraian tugas dan fungsi Kepala Dinas adalah sebagai berikut:

- a) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan dalam melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan Kabupaten di Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta tugas pembantu yang ditetapkan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, kepala Dinas mempunyai tugas :
 - (1) Menetapkan dan menyelenggarakan kegiatan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
 - (2) Merumuskan dan mengembangkan kebijakan sistem dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
 - (3) Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

(4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

(5) Menyusun serta menyiapkan Renstra, Renja dan Langkip Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat.

2) Sekretariat

Adapun uraian tugas dan fungsi Sekretariat adalah :

a) Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan perumusan perencanaan dan program dinas, melaksanakan perumusan program evaluasi dan laporan dari seksi-seksi, melaksanakan pembinaan ketatausahaan yang meliputi urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepala dinas dan seluruh satuan organisasi dilingkungan dinas.

b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, sekretariat mempunyai fungsi :

(1) Melaksanakan urusan umum yang meliputi administrasi, urusan kearsipan dan ekspedisi, pengadaan, peraturan dan pemeliharaan serta pengamanan lingkungan kerja.

(2) Mengumpulkan bahan penyusunan dan petunjuk teknis pelaksanaan peraturan perundang-undangan

dibidang kepegawaian dan mengelola administrasi kepegawaian.

- (3) Mengumpulkan, menyusun dan menganalisa penyusunan program dan analisa kebutuhan perlengkapan.
- (4) Menyiapkan barang dan Dokumen Pengesahan Anggaran (DPA), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- (5) Melakukan perencanaan dan program evaluasi serta laporan sekretariat.
- (6) Menghimpun hasil perencanaan, program evaluasi serta laporan dari bidang-bidang.
- (7) Menyiapkan bahan penyusunan Renstra, Renja dan Langkip Sekretariat.

b. Bidang Pengairan

Adapun uraian tugas dan fungsi dari Bidang Pengairan adalah :

a) Bidang Pengairan mempunyai tugas menyusun program, perencanaan teknis pembinaan serta operasi dan pemeliharaan srana dan prasarana pengairan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas,

Bidang Pengairan mempunyai fungsi :

- (1) Mempersiapkan desaign, menyusun anggran biaya dan syarat-syarat pelaksanaan dibidang pengairan.

- (2) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan / rehabilitasi dan pemeliharaan / perawatan bidang pengairan.
- (3) Melaksanakan bidang pembinaan dan penyuluhan pengairan terhadap para pengelola serta menfaat pengairan.
- (4) Mempersiapkan rekomendasi (advis teknis) dibidang pengairan.
- (5) Menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pengairan.

c. Bidang Bina Marga

Adapun uraian tugas dan fungsi Bidang Bina Marga adalah sebagai berikut :

- a) Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan bidang kebinamargaan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :
 - (1) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan rehabilitasi serta pemeliharaan/ perawatan dibidang kebinamargaan.
 - (2) Mempersiapkan perumusan dan penyusunan RAB dan syarat-syarat pelaksanaan dibidang bina marga.

- (3) Mempersiapkan rekomendasi yang berkaitan dengan kegiatan bidang bina marga.
- (4) Memberikan saran-saran Kepala Dinas tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (5) Menyusun serta menyiapkan Renstra, Renja dan Langkip Bidang Bina Marga.

Bidang Bina Marga terdiri dari seksi survei dan perencanaan Bina Marga, dan Seksi Data dan Pengawasan Bidang Bina Marga.

d. Bidang Cipta Karya

Adapun uraian tugas dan fungsi Bidang Cipta Karya adalah :

- a) Bidang Cipta Karya mempunyai tugas mempersiapkan, menyusun dan melaksanakan program, perencanaan teknis, pembinaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana keciptakaryaan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas, Bidang Cipta Karya memiliki fungsi :
 - (1) Mempersiapkan desain, menyusun anggaran biaya dan syarat-syarat pelaksanaan dibidang cipta karya dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan / rehabilitasi dan pemeliharaan / perawatan dibidang keciptakaryaan.

(2) Melaksanakan pelatihan dan penyuluhan keciptakaryaan terhadap para pengelola dan masyarakat.

(3) Memberikan pelayanan penerbitan izin terhadap segala jenis kegiatan dibidang cipta karya.

2. Penyajian Data

Data yang digunakan dalam penelitian adalah laporan realisasi APBD/RAPBD Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat periode tahun 2016-2020. Data APBD dan RAPBD Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat yang sudah diolah oleh peneliti sebagai berikut:

Tabel 4.1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2016

Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016	Lebih/ (Kurang)	Capaian %	Keterangan
Pendapatan	30.662.300.500	28.798.032.000	-1.864.268.500	94%	Tidak Efektif
Pendapatan Asli Daerah	30.662.300.500	28.798.032.000	-1.864.268.500	94%	Tidak Efektif
Hasil Retribusi Daerah	502.479.000	489.429.098	(13.049.902)	97%	Tidak Efektif
Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah	38.092.872.000	35.979.098.645	-2.113.773.355	94%	Tidak Efektif
Jumlah	38.152.872.000	32.532.098.000	-2.620.774.000	93%	Tidak Efektif
Belanja Operasi	35.186.775.980	33.951.764.000	1.235.011.980	96%	Tidak Efektif
Belanja Pegawai	3.118.262.009	2.108.728.603	9.532.406	99%	Tidak Efektif
Belanja Barang dan Jasa	2.623.446.098	1.572.086.892	1.051.359.206	60%	Tidak Efektif
Belanja	79.273.000.000	46.999.956.269	2.973.043.731	96%	Tidak Efektif
Jumlah	120.201.484.087	84.632.535.764	35.568.948.323	70,40%	Tidak Efektif
Surplus (Defisit)	82.048.612.087	79.580.637.854	-2.467.974.233	97%	Tidak Efektif

Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.1 jika dilihat dari pendekatan *value for money* bahwa di tahun 2016 Pendapatan Daerah, Belanja daerah dan Surplus/ Defisit dari Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat masih belum efektif.

Tabel 4.2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2017

Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	Lebih/ (Kurang)	Capaian %	Keterangan
Pendapatan-LRA	32.652.300.900	27.388.092.001	-5.264.208.899	84%	Tidak Efektif
Pendapatan Asli Daerah	32.652.300.900	27.388.092.001	-5.264.208.899	84%	Tidak Efektif
Hasil Retribusi Daerah	703.425.000	493.239.000	(210.186.000)	70%	Tidak Efektif
Lain-lain PAD yang sah	33.362.198.000	29.579.238.645	-3.782.959.355	88%	Tidak Efektif
Jumlah	34.065.623.000	30.072.477.645	-3.993.145.355	89%	Tidak Efektif
Belanja Operasi	35.984.725.600	23.921.264.700	12.063.460.900	65%	Tidak Efektif
Belanja Pegawai	13.278.262.009	7.108.728.603	6.169.533.406	53%	Tidak Efektif
Belanja Barang dan Jasa	8.723.046.008	4.372.986.892	4.350.059.116	50%	Tidak Efektif
Belanja Modal	39.273.820.000	26.879.956.969	12.393.863.031	58%	Tidak Efektif
Jumlah	97.259.853.617	82.282.940.164	14.976.913.453	84.60%	Tidak Efektif
Surplus (Defisit)	53.194.230.617	22.210.462.519	30.983.768.098	42%	Tidak Efektif
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	53.194.230.617	22.210.462.519	30.983.768.098	42%	Tidak Efektif

Sumber: Data Diolah (2021)

Tabel 4.2 jika dilihat dari pendekatan *value for money* bahwa di tahun 2017 Pendapatan Daerah, Belanja daerah sampai dengan Surplus/ Defisit dari Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat menunjukkan masih belum efektif seperti tahun sebelumnya 2016. Dikarenakan capainnya belum ada yang melebihi dari 100%.

Tabel 4.3. Laporan Realisasi Anggaran Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2018

Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Lebih/ (Kurang)	Capaian %	Keterangan
Pendapatan-LRA	27.152.000.300	25.938.372.000	1.313.628.300	95%	Tidak Efektif
Pendapatan Asli Daerah	27.152.000.300	25.938.372.000	1.313.628.300	95%	Tidak Efektif
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	96.975.000	153.669.000	-56.694.000	160%	Efektif
Lain-lain PAD yang sah	27.610.198.000	25.549.380.645	2.060.817.355	92%	Tidak Efektif
Belanja	119.556.456.886	93.961.265.498	25.595.191.388	78.59%	Tidak Efektif
Belanja Operasi	33.175.591.000	30.383.329.849	2.792.261.151	91%	Tidak Efektif
Belanja Pegawai	6.352.081.000	4.601.090.868	1.750.990.132	73%	Tidak Efektif
Belanja Barang dan Jasa	3.710.319.700	1.329.583.332	2.380.736.368	35%	Tidak Efektif
Belanja Modal	67.044.877.186	48.557.882.880	18.486.994.306	72%	Tidak Efektif
Belanja Peralatan dan Mesin	9.273.588.000	9.089.378.569	184.209.431	98%	Tidak Efektif
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0		
Surplus / (Defisit)	-92.304.456.586	68.022.893.498	24.281.563.088	73%	Tidak Efektif
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-92.304.456.586	-68.022.893.498	24.281.563.088	73%	Tidak Efektif

Sumber: Data Diolah (2021)

Pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa tahun 2018 Pendapatan Daerah sampai dengan Surplus/Defisit juga hampir sama dengan tahun 2017, yaitu menunjukkan masih belum efektif. Akan tetapi, pada Pendapatan Retribusi Daerah-LRA sudah mencapai capaian efektif. Dikarenakan capainnya melebihi dari 100%.

Tabel 4.4. Laporan Realisasi Anggaran Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2019

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Lebih/ (Kurang)	Capaian %	Keterangan
Pendapatan-LRA	22.252.030.900	27.388.312.000	5.136.281.100	124%	Efektif
Pendapatan Asli Daerah	22.252.030.900	27.388.312.000	5.136.281.100	124%	Efektif
Pendapatan Retribusi Daerah	613.425.000	753.669.000	140.244.000	123%	Efektif
Lain-lain PAD yang sah	29.362.198.000	31.579.238.645	2.217.040.645	107%	Efektif
Belanja	71.976.860.805	62.419.983.252	9.556.877.553	86.72%	Tidak Efektif
Belanja Operasi	630.750.000	22.097.245.313	21.466.495.313	35 %	Tidak Efektif
Belanja Pegawai	5.278.262.009	3.108.928.003	2.169.334.006	58%	Tidak Efektif
Belanja Barang dan Jasa	4.663.316.000	3.372.986.892	1.290.329.108	72%	Tidak Efektif
Belanja Modal	60.004.877.186	32.557.882.880	27.446.994.306	54%	Tidak Efektif
Belanja Peralatan dan Mesin	1.399.653.610	1.282.940.164	116.713.416	91%	Tidak Efektif
Surplus (Defisit)	-49.724.829.905	-34.031.671.252	15.693158.653	68%	Tidak Efektif
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-49.724.829.905	-34.031.671.252	15.693158.653	68 %	Tidak Efektif

Sumber: Data diolah (2021)

Pada Tabel 4.4 tahun 2019 Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat dilihat menggunakan *value for money* sudah mulai lebih baik dari tahun sebelumnya. Dapat dilihat dari pendapatannya yang sudah efektif.

Tabel 4.5. Laporan Realisasi Anggaran Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	Lebih/ (Kurang)	Capaian %	Keterangan
Pendapatan-LRA	22.752.180.900	26.178.732.000	3.426.552.100	115%	Efektif
Pendapatan Asli Daerah	22.752.180.900	26.178.732.000	3.426.552.100	115%	Efektif
Pendapatan Retribusi Daerah	719.425.900	833.879.003	114.453.103	116%	Efektif
Lain-lain PAD yang sah	32.362.198.503	35.509.278.640	3.147.080.137	109%	Efektif
Belanja	74.857.248.974	67.182.925.734	7.674.323.240	88%	Tidak Efektif
Belanja Operasi	465.340.580	461.097.195	4.243.385	99%	Tidak Efektif
Belanja Pegawai	4.078.642.109	3.378.928.913	699.713.196	83%	Tidak Efektif
Belanja Barang dan Jasa	5.163.816.069	5.502.086.192	338.270.123	106%	Efektif
Belanja Modal	63.504.837.186	56.557.872.980	6.946.964.206	89%	Tidak Efektif
Belanja Peralatan dan Mesin	2.109.953.610	1.282.940.454	827.013.156	61%	Tidak Efektif
Surplus (Defisit)	52.105.068.074	41.004.193.734	11.100.874.340	78%	Tidak Efektif
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	52.105.068.074	41.004.193.734	11.100.874.340	78%	Tidak Efektif

Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.5 tahun anggaran 2020, Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat semakin membaik tingkat keefektifannya dari tahun sebelumnya. Bisa dilihat dari Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2020 sudah dikategori efektif, walaupun Belanja Surplus/ Defisit masih belum efektif.

3. Analisis Data

Value For Money merupakan variabel utama didalam penelitian ini yang terbagi menjadi 3 rasio yaitu: rasio ekonomis, rasio efisiensi dan rasio efektivitas.

- a. Ekonomis yang berarati hemat dan cermat dalam pengadaan alokasi sumber daya
- b. Efisiensi artinya berdaya guna dalam penggunaan sumber daya untuk hasil yang maksimal
- c. Efektif artinya berhasil guna dalam mencapai tujuan dan sasaran.

1) Uji Rasio Ekonomis

Ekonomis memiliki pengertian bahwa perolehan *input* dengan kualitas tertentu dengan harga terendah (*Spending less*). Ekonomis merupakan perbandingan input dengan input value yang berarti perbandingan antara pengeluaran instansi dengan anggaran yang ditetapkan.

Dalam penelitian pengukuran rasio ekonomis menurut Mahsun (2016) dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Input}}{\text{Input Value}} \times 100\%$$

Keterangan :

Input : Realisasi Pengeluaran

Input Value : Anggaran Pengeluaran

Tabel 4.6. Rasio Ekonomis Kinerja Keuangan Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat Tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi Anggaran (Rp) A	Anggaran (Rp) B	Rasio Ekonomi (%) $A/B \times 100$	Kriteria
2016	84.632.535.764	120.201.484.087	70.40%	Ekonomis
2017	82.282.940.164	97.259.853.617	84.60%	Cukup Ekonomis
2018	93.961.265.498	119.556.456.886	78.59%	Ekonomis
2019	62.419.983.252	71.976.860.805	86.72%	Cukup Ekonomis
2020	67.182.925.734	74.857.248.974	89.74%	Cukup Ekonomis

Sumber : Data Sekunder, Diolah(2021)

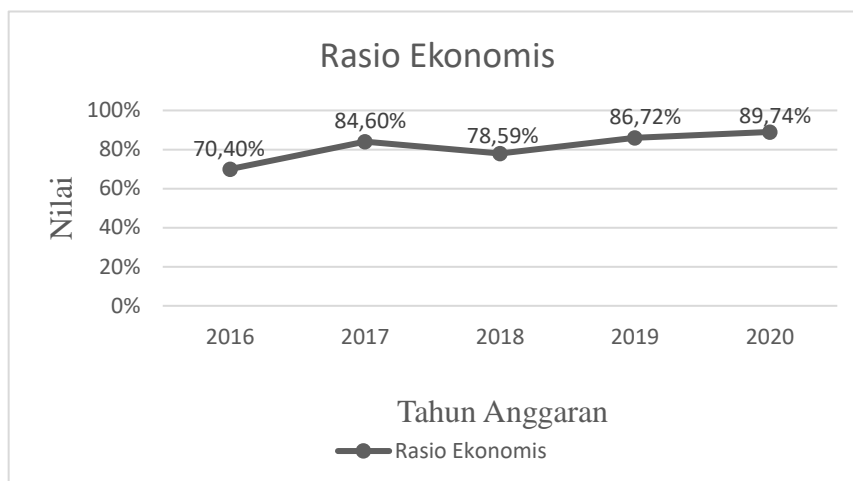
Pada tabel 4.6 hasil dari perhitung rasio ekonomis yang menggambarkan analisis kinerja keuangan Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat berdasarkan rasio ekonomis tahun anggaran 2016-2020 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2016 kinerja keuangan Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat telah memenuhi kriteria ekonomis karena mencapai dikisaran antara 70%-80% yaitu sebesar 70,40%. Tahun anggaran 2017 mengalami kenaikan sebesar 14.02% dibandingkan tahun 2016. Hal ini terlihat dari persentase rasio ekonomis di tahun 2017 yaitu sebesar 84.66%, namun masih berada dirasio cukup ekonomis dikisaran 80%-90%, sedangkan ditahun anggaran 2018 kinerja keuangan Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat mengalami penurunan yaitu sebesar 6.01% dengan persentase nilainya sebesar 78.59% yang sedikit lebih besar penurunannya dibanding dengan peningkatan tahun lalu, sehingga masuk dalam kriteria ekonomis dibandingkan dua tahun sebelumnya. Tahun Anggaran 2019 kembali mengalami kenaikan sebesar 8.13% dengan persentase sebesar 86.72% dan pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan sebesar 3.02% dengan

persentase sebesar 89.74% tetapi tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020 masih berada dikriteria cukup ekonomis karena berada di kategori 80%-90%.

Tahun Anggaran 2016-2020 rasio ekonomis rata-rata berada direntang 80%-90% sehingga Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat dikatakan cukup ekonomis berdasar hasil uji ekonomis yang menunjukkan rentang 80%-90%. Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat dianggap baik dalam kegiatan anggaran pada saat akan memulai pelaksanaan program kegiatan sampai akhir masa pelaksanaanya.

Pada program kegiatan anggaran yang terpakai tidak terjadi pemborosan karena anggaran yang terpakai hanya dilakukan untuk keperluan belanja operasional dan belanja modal. Belanja operasional terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah dan belanja bantuan keuangan. Sedangkan pada belanja modal terdiri dari peralatan dan mesin, belanja modal jalan dan jembatan dan belanja modal bangunan serta irigasi dan jaringan. Realisasi pada belanja operasional dianggap lebih kecil dibandingkan anggaran yang ditetapkan karena menunjukkan bahwa tidak terjadinya pemborosan. Tahun anggaran 2016 menjadi yang terbaik karena menghasilkan rasio ekonomis sebesar 70.40% dan dikatakan pada kriteria ekonomis.

Grafik perkembangan kinerja keuangan pada rasio ekonomis Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut :



Gambar 4.4. Grafik Perkembangan Rasio Ekonomis Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2016-2020

Sumber : Data Sekunder, Diolah (2021)

Grafik 4.4 menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi pada rasio ekonomis Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat. Hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah belanja Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat. Melalui analisis rasio ekonomis maka dapat diketahui seberapa besar realisasi belanja terhadap target belanja yang telah ditentukan pada capaian setiap periode tertentu.

Menurut Mahsun (2016) rasio ekonomis adalah kegiatan untuk melihat suatu organisasi pemerintahan yang dapat mencakup seberapa baik organisasi tersebut dalam mengelola keuangan secara cermat dan tidak ada pemborosan.

2) Uji Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi merupakan capaian output yang maksimum dengan input tertentu. Untuk menghitung rasio efisiensi dalam mengelola keuangan

dapat dilihat perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Dalam penelitian pengukuran rasio efisiensi menurut Mahsun (2016) dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

Keterangan:

Output : Realisasi Belanja/Biaya

Input : Realisasi Pendapatan /Anggaran

Tabel 4.7. Rasio Efisiensi Kinerja Keuangan Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat Tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi Belanja (Rp) A	Realisasi Pendapatan (Rp) B	Rasio Efisiensi (%) A/B x 100	Kriteria
2016	84.632.535.764	28.798.032.000	293%	Tidak Efisien
2017	82.282.940.164	27.388.092.001	300%	Tidak Efisien
2018	93.961.265.498	25.938.372.000	362%	Tidak Efisien
2019	62.419.983.252	27.388.312.000	227%	Tidak Efisien
2020	67.182.925.734	26.178.732.000	256%	Tidak Efisien

Sumber : Data Sekunder, Diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.7 tahun anggaran 2016-2020 hasil perhitungan rasio efisiensi penilaian kinerja keuangan Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat dengan *value for money* menunjukkan hasil dalam kriteria tidak efisien, karena melebihi 100%. Pada tahun 2016 hasil rasio efisiensi menunjukkan hasil 293%, pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 7% sehingga capain rasio efisiensi pada 2017 sebesar 300%, pada tahun 2018 sebesar 362% pada tahun ini terus mengalami kenaikan sebesar 62%, pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 135% sehingga pada tahun 2019 rasio efisiensi sebesar 227%, dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan lagi sebesar 29% sehingga rasio efisiensinya sebesar 256%.

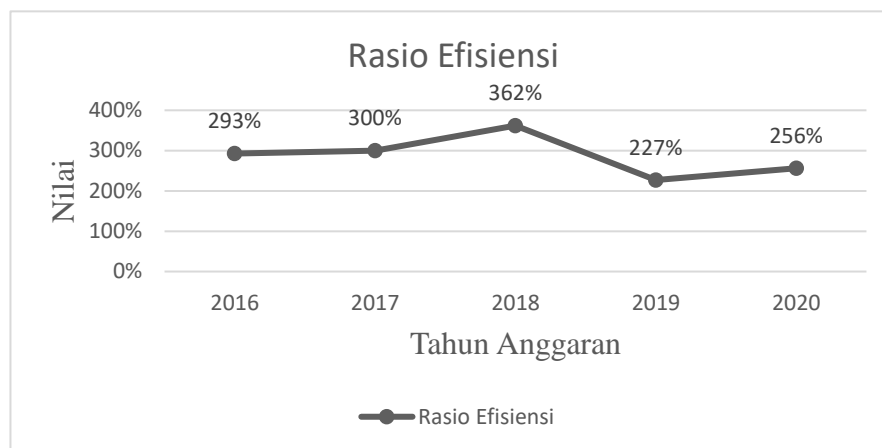
Hal ini yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat periode tahun 2016-2020 adalah masih dikatakan tidak efisiensi, karena hasil perhitungannya jauh lebih besar dari 100%.

Menurut Mahsun (2016:187) kriteria efisiensi dinilai efisien apabila suatu perusahaan /Organisasi sektor publik memperoleh nilai kurang dari 100%. Rasio efisiensi tidak dinyatakan dalam bentuk absolute tetapi dalam bentuk yang relative.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sebastian Nicola (2019) dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Melalui Pendekatan *Value For Money* Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara”. Dimana dalam penelitian tersebut hasil perhitungan rasio efisiensi pada tahun 2014 menunjukkan hasil 340%, pada tahun 2015 menunjukkan hasil 319% dan tahun 2016 menunjukkan hasil 379%. Sehingga menunjukkan kinerja keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2014-2016 adalah tidak efisien.

Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat masih sangat jauh dari tingkat efisiensi. Berdasarkan dari hasil perhitungan tersebut dapat diartikan bahwa jumlah belanja pada Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat jauh lebih besar dibandingkan dengan penerimaannya. Sehingga kinerja Keuangan Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat tidak efisiensi dalam melakukan penganggaran anggaran biaya untuk memperoleh pendapatan.

Grafik perkembangan kinerja keuangan pada rasio efisiensi Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut :



Gambar 4.5. Grafik Perkembangan Rasio Efisiensi Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2016-2020

Sumber : Data Sekunder, Diolah (2021)

Grafik 4.5 menunjukkan bahwa Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat terjadi fluktuasi dan dikategorikan pada kriteria tidak efisiensi pada rasio efisiensi. Hal ini disebabkan karena jumlah belanja Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat jauh lebih besar dibandingkan penerimaannya. Melalui analisis rasio efisiensi maka dapat diketahui seberapa besar realisasi belanja terhadap realisasi pendapatan yang telah ditentukan pada capaian setiap periode tertentu.

Suatu kegiatan operasional dikatakan efisiensi apabila suatu kegiatan dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana serendah-rendahnya (spending-well). Menurut Mahsun (2016) rasio efisiensi tidak dinyatakan dalam bentuk absolute (mutlak) tetapi dalam bentuk relatif dan pengukuran tingkat efisiensi hanya memerlukan data-data realisasi belanja saja.

3) Uji Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas merupakan tingkat capaian hasil program dengan target yang sudah ditetapkan yang menggambarkan kemampuan organisasi dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan dibandingkan dengan target

yang sudah ditetapkan. Untuk menghitung rasio efektivitas dalam pengelolaan keuangan dapat dilihat perbandingan anggaran pendapatan dengan realisasinya dan persentase tingkat capaian atau disebut realisasi pendapatan.

Dalam penelitian pengukuran rasio efektivitas menurut Mahmudi (2016) dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Keterangan:

Outcome : Realisasi Pendapatan

Output : Anggaran Pendapatan

Tabel 4. 8 Rasio Efektivitas Kinerja Keuangan Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2016-2020

Tahun	Realisasi Pendapatan (Rp) A	Anggaran Pendapatan (Rp) B	Rasio Efektivitas (%) A/B x 100	Kriteria
2016	28.798.032.000	30.662.300.500	94%	Tidak Efektif
2017	27.388.092.001	32.652.300.900	84%	Tidak Efektif
2018	25.938.372.000	27.152.000.300	95%	Tidak Efektif
2019	27.388.312.000	22.252.030.900	124%	Efektif
2020	26.178.732.000	22.752.180.000	115%	Efektif

Sumber : Data Sekunder, Diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.8 menggambarkan analisis kinerja keuangan Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat berdasarkan *value for money* yang terdiri dari rasio efektivitas. Berdasarkan perhitungan tersebut, pada tahun 2016 menunjukkan hasil sebesar 94%, yang berarti kinerja pada tahun 2016 tidak efektif karena hasil perhitungan kurang dari 100%. Kemudian pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 10% dengan hasil sebesar 84%, yang berarti bahwa kinerja pada tahun 2017 masih tidak efektif karena hasil

perhitungan berada kurang dari 100%. Namun, pada tahun 2018 hasil perhitungan mengalami kenaikan sebesar 11% dengan hasil perhitungan sebesar 95% tetapi kinerja pada tahun 2018 masih berada dikriteria tidak efektif karena hasil perhitungannya masih kurang dari 100%. Menurut Mahsun (2016) jika kriteria efektivitas memperoleh nilai kurang dari 100% maka dianggap tidak efektif.

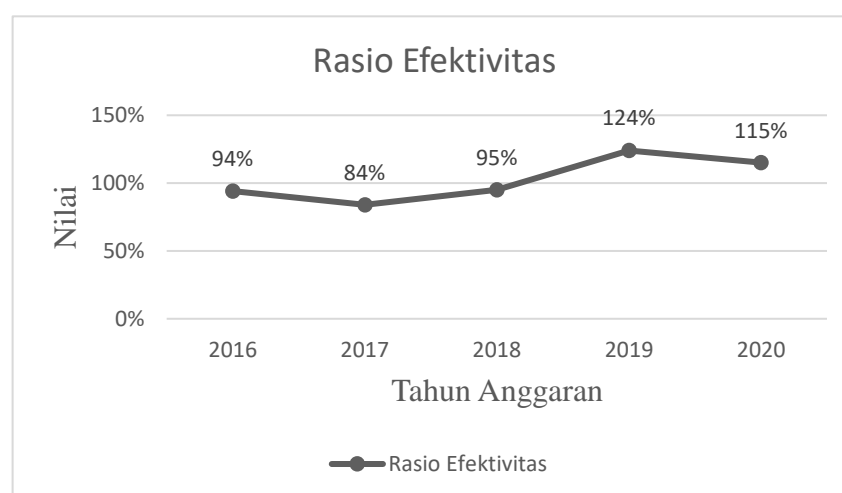
Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Sebastian Nicola (2019) dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Melalui Pendekatan *Value For Money* Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan hasil perhitungannya, rasio efektivitas untuk penerapan pengukuran kinerja value for money Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2014 dan 2015 dinilai tidak efektif karena hasil perhitungannya kurang dari 100%.

Sedangkan, pada tahun 2019 menunjukkan hasil sebesar 124% dengan kenaikan sebesar 29%, yang berarti pada tahun 2019 masuk dalam kriteria efektif karena hasil perhitungannya mampu melebihi dari 100%. Tetapi, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 9% dengan hasil perhitungan sebesar 115% sehingga pada tahun 2020 dilihat dari hasil perhitungannya masuk kedalam kriteria efektif karena hasil perhitungannya masih melebihi 100%. Tahun anggaran 2019 menjadikan tahun yang terbaik dilihat dari segi efektivitas karena mampu menghasilkan rasio efektivitas sebesar 124%.

Berdasarkan kriteria efektivitas apabila pendapatan diatas 100% maka dianggap efektif sedangkan tidak mencapai 100% maka dianggap tidak

efektif. Jika melihat persentase diatas tingkat pendapatan Dinas PUPR Bina Marga kabupaten Langkat pada tahun 2016 sampai 2018 tidak efektif karena persentasenya kurang dari 100% sedangkan pada tahun 2019-2020 tingkat pendapatannya efektif karena persentase melebihi 100%. Hal yang menyebabkan tidak tercapainya efektivitas adalah dikarenakan adanya beberapa faktor seperti kondisi alat-alat berat yang ada kurang baik, langkanya bahan material dan faktor cuaca.

Grafik perkembangan kinerja keuangan pada rasio efektivitas Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut::



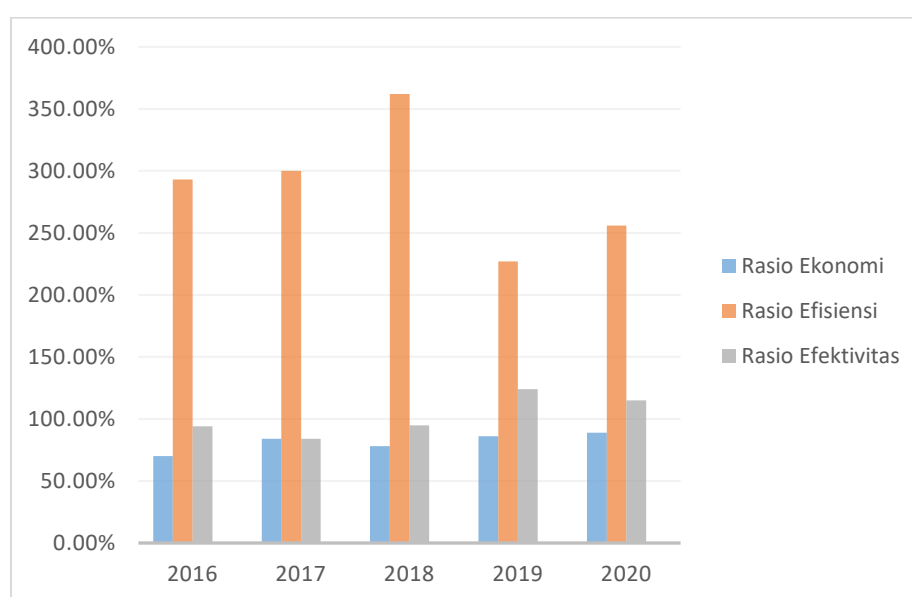
Gambar 4.6. Grafik Perkembangan Rasio Efektivitas Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2016-2020

Sumber : Data Sekunder, Diolah (2021)

Grafik 4.6 menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi rasio efektivitas. pada tahun 2016 sampai dengan 2017 mengalami penurunan. Tahun 2017 sampai dengan 2018 mengalami kenaikan. Tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan sedangkan pada tahun 2019 sampai dengan 2020 kembali mengalami penurunan.

Kinerja efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya, namun efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan metode *Value For Money* pengukuran kinerja keuangan Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat yang diukur dengan menggunakan rasio ekonomis, rasio efisiensi dan rasio efektivitas mengalami penurunan, hal ini dapat dilihat dari trend dibawah ini:



Gambar 4.7. Grafik Perkembangan Rasio Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2016-2020

Sumber : Data Sekunder, Diolah (2021)

Gambar 4.7 menunjukkan untuk rasio ekonomis biaya dari jumlah belanja mengalami fluktuatif, sedangkan untuk tingkat rasio efisiensi belanja ditahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami penurunan , hanya ditahun 2018 yang mengalami peningkatan, dan untuk tingkat efektivitas pendapatan Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat mengalami peningkatan juga penurunan.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pembahasan diatas mengenai pengukuran ekonomis, efisiensi, efektivitas pada Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat tahun 2016-2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil pengukuran kinerja keuangan Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat periode tahun 2016-2020 menggunakan metode *value for money* untuk mengukur tingkat ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat masih ada beberapa kinerja keuangan yang harus diperbaiki untuk memenuhi prinsip metode *value for money* guna menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya untuk menggali potensi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat dan mendorong masyarakat ikut serta berperan dalam pembangunan didaerah.

Berdasarkan hasil analisis data, maka hasil pembahasan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Ekonomi

Pengukuran ekonomis bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat periode tahun 2016-2020 dalam memperoleh dan mengelola sumber daya (*input*) yang dibutuhkan agar dapat menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Tingkat ekonomis suatu kegiatan tidak hanya dilihat dari besarnya penghematan yang dilakukan Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat, tetapi juga harus

mempertimbangkan keluaran (*output*) yang dihasilkan tidak sesuai dengan target atau tidak tercapai secara maksimal.

Berdasarkan hasil analisis data atas pengukuran rasio ekonomis terhadap Dinas PUPR Bina Marga Kabuapten Langkat diketahui bahwa telah berada di kriteria ekonomis dan cukup ekonomis. Hal ini dapat dilihat dari total anggaran yang disediakan setiap tahunnya tidak habis terpakai dalam memenuhi seluruh program kegiatan pada setiap tahunnya, dengan nilai rata-rata *output* yang dihasilkan hampir mencapai maksimal, yaitu sebesar 70,40% pada tahun 2016, 84,60 % pada tahun 2017, 78,59% pada tahun 2018, 86,72% pada tahun 2019 dan 89,74% pada tahun 2020.

Dapat disimpulkan pada tahun anggaran 2016 ketahun anggaran 2017 mengalami peningkatan sebesar 14.02% , yaitu dari 70,40% menjadi 84.66%. Pada tahun anggaran 2017 ke tahun anggaran 2018 mengalami penurunan sebesar 6.01% yaitu dari 84,60% menjadi 78,59%. Pada tahun anggaran 2018 ke tahun anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar 8,13% yaitu dari 78,59% menjadi 86,72%. Pada tahun anggaran 2019 ketahun anggaran 2020 terus mengalami kenaikan sebesar 3,02%, yaitu dari 86,72% menjadi dengan persentase sebesar 86.72%.

Penyebab rasio ekonomis yang mengalami peningkatan terjadi dikarenakan besarnya realisasi atas belanja daerah yang dikeluarkan oleh Dinas PUPR Bina Marga kabupaten Langkat. Dengan meningkatnya tingkat rasio ekonomis Dinas PUPR Bina

Marga Kabupaten Langkat , menunjukkan bahwa penghematan dalam belanja mengalami penurunan.

2. Efisiensi

Menghitung rasio efisiensi dalam mengelola keuangan dapat dilihat dengan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan (realisasi belanja) untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Realisasi belanja pada tahun 2016 berjumlah Rp. 84.632.535.764, pada tahun 2017 Rp. 82.282.940.164, pada tahun 2018 Rp. 93.961.265.498, pada tahun 2019 Rp. 62.419.983.252 dan pada tahun 2020 Rp. 67.182.925.734. Sedangkan realisasi pendapatan (anggaran belanja) pada tahun 2016 berjumlah Rp. 28.798.032.000, pada tahun 2017 Rp. 27.388.092.001, pada tahun 2018 Rp. 25.938.372.000, pada tahun 2019 Rp. 27.388.312.000 dan pada tahun 2020 Rp. 26.178.732.000.

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa untuk penerapan pengukuran kinerja keuangan dengan metode *value for money* pada Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat dengan menggunakan rasio efisiensi yang menunjukkan hasil 293% pada tahun 2016, 300% pada tahun 2017, 362% pada tahun 2018, 227% pada tahun 2019 dan 256% pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan kinerja keuangan Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat periode tahun 2016-2020 adalah tidak efisiensi, ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomis di Dinas

PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat setiap tahun mengalami peningkatan namun secara tidak signifikan sehingga kinerja keuangan pada Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat menjadi tidak efisien dalam pembelanjaan.

Penyebab rasio efisiensi yang mengalami peningkatan seperti pada tahun 2016 ke tahun 2017, tahun 2017 ke tahun 2018 terjadi dikarenakan besarnya belanja yang dikeluarkan oleh Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat, bahkan realisasi belanja melebihi dari target yang ditetapkan. Dengan meningkatnya rasio efisiensi menunjukkan bahwa kinerja keuangan oleh Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat mengalami penurunan dalam menghemat belanja daerah, atas pendapatan daerah yang di peroleh oleh Dinas PUPR Bina Marga .

3. Efektivitas

Menghitung rasio efektivitas dalam mengelola keuangan dapat dilihat dengan perbandingan antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan untuk memperoleh realisasi pendapatan. Kinerja pada Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat periode tahun 2016-2020 jika dilihat dari segi efektivitas dapat dikatakan efektif apabila hasil perhitungannya diatas 100%. Sementara rata-rata hasil perhitungan rasio efektifnya ada yang berada dibawah angka kriteria. Hasil perhitungan pada periode tahun 2016-2018 dinilai tidak efektif namun pada periode 2019-2020 dinilai efektif.

Berdasarkan hasil analisis data atas pengukuran rasio efektivitas terhadap Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat diketahui bahwa ada yang belum memenuhi kriteria efektif yaitu pada tahun 2016-2018 sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 diketahui telah memenuhi kriteria efektif. Belum memenuhi standar efektivitas karena hasil perhitungan kurang dari 100% yaitu 94%,84% dan 95%. Hal ini dapat dilihat pada Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat dinilai tidak efektif dalam mengelola penerimaan APBN dengan faktor realisasi penerimaan APBN selama 3 tahun pada umumnya lebih rendah dibandingkan target yang ditetapkan.. Namun pada tahun 2019 dan 2020 hasil perhitungan melebihi dari 100% yaitu 124% dan 115%. Hal ini dapat dilihat pada Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat dinilai efektif dalam mengelola penerimaan APBN dengan faktor realisasi penerimaan APBN selama 2 tahun terakhir.

Penyebab rasio efektivitas yang mengalami penurunan dengan rata-rata dibawah 100%, hal ini terjadi dikarenakan Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat belum mampu dalam mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan. Dengan menurunnya rasio efektivitas menunjukkan bahwa kemampuan Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat dalam meningkatkan pendapatan daerah mengalami penurunan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dengan menggunakan metode *value for money* maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian mengenai kinerja keuangan Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat periode tahun anggaran 2016-2020 jika dilihat dari segi ekonomis hasil perhitungan rasio ekonomis nya mengalami fluktuatif namun tetap berada dibawah angka kriteria yaitu dibawah 100% sehingga rasio ekonomis dinilai baik. Hasil perhitungan tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun anggaran 2020 menunjukkan hasil yang ekonomis dan cukup ekonomis.
2. Hasil penelitian mengenai kinerja keuangan Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat dari segi efisiensi hasil perhitungan rasio efisiensinya mengalami fluktuatif namun tetap berada diatas angka kriteria yaitu diatas 100% sehingga rasio efisiensi dinilai tidak baik. Hasil perhitungan tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun anggaran 2020 menunjukkan hasil yang kurang efisien. Suatu kinerja dapat dikatakan efisien apabila hasil perhitungannya dibawah 100%. Sementara hasil perhitungan rasio efisiensinya berada sangat jauh diatas angka kriteria. Hal ini disebabkan karena setiap tahunnya total belanja selalu jauh lebih besar dari pada total pendapatan.
3. Hasil penelitian mengenai kinerja keuangan Dinas PUPR Bina Marga Kabupaten Langkat dari segi efektivitas hasil perhitungan rasio

efektivitasnya mengalami fluktuatif. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 hasil perhitungan dinilai tidak baik. Tetapi, hasil perhitungan rasio efektivitas tahun 2019 dan tahun 2020 dinilai baik. Kinerja dapat dikatakan efektif apabila hasil perhitungannya berada diatas 100%. Tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun 2018 berada dibawah angka kriterai yaitu dibawah 100% maka ini yang menyebabkan hasil perhitungan efektivitas dinilai tidak baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka terdapat beberapa saran yang dapat diajukan, yaitu:

1. Dinas PUPR Bina Marga Kabuapten Langkat pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dari segi ekonomis dapat dikatakan telah menggunakan anggarannya dengan baik dalam arti dapat menghemat pengeluaran biaya. Instansi juga diharapkan tetap lebih menghemat lagi dalam pengeluaran biayaa agar tingkat ekonomis yang sudah memenuhi kriteria terus megalami kenaikan.
2. Dinas PUPR Bina Marga Kabuapten Langkat pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dari segi efisiensi disarankan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangannya yang masih tidak baik agar menjadi lebih baik. Agar tingkat efiseinsi dapat menjadi baik, Instansi harus lebih menekankan lagi biaya-biaya operasionalnya.sehingga jumlah belanja tidak lebih besar dari jumlah pendapatan.
3. Dinas PUPR Bina Marga Kabuapten Langkat pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dari segi efektivitas kinerja pengelolaan

keuangannya masih dianggap tidak baik. Disarankan agar dapat meningkatkan kinerja pengelolaan keuangannya menjadi lebih baik. Pada tingkat efektivitas periode tahun 2016 samapai dengan 2018 menunjukkan hasil yang tidak efektif, hal ini dikarenakan Dinas PUPR Bina Marga Kabuapten Langkat mengevaluasi atau menurunkan target anggarannya. Agar tingkat efektivitas dapat menjadi baik, Dinas PUPR Bina Marga Kabuapten Langkat harus menaikkan kembali target anggarannya

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi 3*. Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mahsun, & Mohamad. (2016). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik Edisi 1*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Terbaru. Yogyakarta: ANDI (Anggota IKAPI).
- Sihombing, H. (2018) *Analisis Laporan Keuangan (Sektor Swasta dan Pemerintah Daerah)*. Yogyakarta: Andi
- Sugioyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:: Alfabeta.
- V. Wiratna Sujarweni. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Baru.

JURNAL

- Agus Purnomo Adi Putra dan Ni Gusti Putu Wirawati. 2015. *Penilaian Kinerja Atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabanan*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 11(1), 252-268.
- Amalia, P. R. (2015). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Konsep Value For Money Di Pemerintah Kota Ternate (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Manado)*.
- Annisa, D. (2011). *Evaluasi Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kota Makasar Dengan Menggunakan Metode Value For Money K*. *JAZ: Jurnal Akuntansi*
- Ardila, I., & Putri, A. A. (2015). Analisis Kinerja Keunagan Dengan Pendekatan Value For Money Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 15(1).
- Arief, F. R., Basri, Y.M., & Indrawati, N. (2017). *Analisis Kinerja Pemerintah Provinsi Riau Berdasarkan Value For Noney Audit*. *Jurnal Ekonomi*, 25(2), 1.
- Alhamdani, M. R., & Sari, D. P. (2019). *Performance Evaluation of Pontianak Kapuas Indah Market from Architecture and Behaviour Aspect*. *Journal of Architectural Research and Education*, 1(2), 107.
- Franita, R. (2020). Efektifitas audit internal di tengah wabah covid. Nusantara: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 482-488.

- Hajar, S., & Kholik, K. (2021). Model mata kuliah administrasi pembangunan dalam menghasilkan kompetensi lulusan sebagai administrator andal di bidang perencanaan pembangunan. *Warta Dharmawangsa*, 15(3), 429-442.
- Khalikussabir, K. (2017). *Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Value for money (Studi Kasus Pada Dinas PU Pengairan, PU Binamarga & PU Cipta Karya Kabupaten Probolinggo)*. *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*, 6(3).
- Kurrohman, T. (2013). *Evaluasi penganggaran berbasis kinerja melalui kinerja keuangan yang berbasis value for money dikabupaten/kota di Jawa Timur*. *Jurnal Dinamika*, 5(1).
- Liando, H. S., Saerang, D. P. E., & Elim, I. (2014). *Analisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten kepulauan sangihe menggunakan metode value for money*. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(3).
- Mulyanigtyas, M. (2018). *Analisis Kinerja Keuangan Kota Mojokerto Dengan Pendekatan Value For Money*. *PRIVE: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 1-14.
- Pangkey, A. R., Saerang, I. S., & Tulung, J. E. (2017). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2011-2015*. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(3).
- Rahayu, E. F. (2020). *Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value For Money Pada Distrik Navigasi Kelas II Banjarmasin Tahun 2016-2019* (Doctoral dissertation, STIE Indonesia Banjarmasin).
- Rinaldy, R. (2017). *Analisa Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value For Money Pada Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2013-2015*. *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*, 8(1).
- Riswandi, P. R. (2018). *Analisis Realisasi Anggaran Belanja Pada Balai Unihaz*, 1(1), 11-21.
- Sari, D. O., Syamsurizaldi, S., & Yuslim, Y. (2019). *Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja KPU Kabupaten Bungo Pada Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015*. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 6(2), 298-313.
- Sebayang, S. A. (2018). *Analisis structural equation modelling (sem) terhadap alih fungsi lahan pertanian dan kesejahteraan ekonomi masyarakat*. *At-tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, 4(2), 169-184.
- Wira, W. (2014). *Analisis Kinerja Keuangan Pada Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bintan Dengan Menggunakan Konsep Value For Money*. *Jurnal. Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang*.

WEBSITE

Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat Dalam Angka 2020
<https://langkatkab.bps.go.id/> (diakses 7 Desember 2020)

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah menjadi Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2007, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
<https://peraturan.bpk.go.id> (diakses 4 Januari 2021).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.
<http://www.djpk.kemenkeu.go.id> dan <https://peraturan.bpk.go.id> (diakses 10 Desember 2020).